



**PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR; ANALISIS DAN  
INTERPRETASI POLITIK ISLAM MASA ORDE LAMA  
DAN AWAL ORDE BARU**

**Peneliti**

**Drs. Mhd. Syahminan, MA.g**

**Konsultan**

**Dr. Sukiman, MS.i**

**FAKULTAS USHULUDDIN IAIN**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2012**



**PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR; ANALISIS DAN  
INTERPRETASI POLITIK ISLAM MASA ORDE LAMA  
DAN AWAL ORDE BARU**

**Peneliti**

**Drs. Mhd. Syahminan, MA.g**

**Konsultan**

**Dr. Sukiman, MS.i**

**FAKULTAS USHULUDDIN IAIN**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2012**



**PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR; ANALISIS DAN  
INTERPRETASI POLITIK ISLAM MASA ORDE LAMA  
DAN AWAL ORDE BARU**

**Peneliti**

**Drs. Mhd. Syahminan, MA.g**

**Konsultan**

**Dr. Sukiman, MS.i**

**FAKULTAS USHULUDDIN IAIN**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2012**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas perkenannya, Penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu, shalawat dan salam kepada junjungan, Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan Allah contoh dan teladan bagi umat Islam atas semua akhlak dan kepribadiannya.

Penelitian ini berjudul *PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR; ANALISIS DAN INTERPRETASI POLITIK ISLAM DIMASA ORDE LAMA DAN AWAL ORDE BARU* merupakan penelusuran terhadap pemikiran politik M. Natsir, Ideologi politik, sumber-sumber pemikiran politik dan berbagai dimensi politik yang mengitarinya sesuai dengan konteks, ketika seorang tokoh hidup. M. Natsir, selain seorang pemikir politik, juga seorang praktisi politik yang ulung dizamannya, Natsir berkiprah sejak awal pembentukan landasan ideologi Bangsa Indonesia, sebagai seorang nasionalis yang menganut pandangan keislaman dalam politik, secara kontroversial berhadapan dengan pemikiran politik Soekarno yang liberalis dan sekuler. Meski terlihat bahwa nasionalisme Soekarno menganut paham ketimuran, sebagaimana yang disebut Soekarno nasionalisme yang mengandung sebuah roh. Tetapi meski demikian bagi M. Natsir pemikiran politik Barat, justru mengandung kerancuan, dimana paham itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang mayoritas menganut Islam yang memiliki cita tauhid. Karena itu pemikiran politik M. Natsir berawal dan berakhir dalam kerangka tauhid, yang tidak dapat ditawar lagi. Akibatnya kontroversi ideologi politik ini memanjang selama masa

Orde Lama, tetapi telah membangun suatu pandangan politik yang lebih mapan untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perumusan dan kesepakatan yang digodok secara mendalam oleh tokoh dan pemikir politik Indonesia, termasuk oleh M. Natsir, meski dengan sudut pandang yang berbeda dari tokoh dan pemikir politik sekuler.

Terimakasih saya ucapkan kepada semua komponen yang telah mengambil peran dalam penyelesaian penelitian ini. Dan bagi pembaca mohon saran dan kritiknya untuk membangun pemikiran yang lebih baik pada masa mendatang. Amin YaRobbal 'Alamin

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Kajian awal kepustakaan.....	8
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika penelitian.....	10
BAB II. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA.....	11
A. Pemikiran Islam abad ke-20.....	11
B. Masa kolonial.....	21
C. Pra Kemerdekaan; Pergulatan idiologi politik.....	27
D. Masa Orde Baru; Faktor pembangunan dan stabilitas....	34
BAB III. BIOGRAFI M. NATSIR DAN PEMIKIRAN POLITIK.....	40
A. Biografi M. Natsir.....	40
B. Konstruksi pemikiran politik.....	46
C. Karakteristik idiologi politik.....	53
BAB IV. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran intelektual Islam di Indonesia, tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melatar belakanginya, Belanda menerapkan politik Asosiasi yang disarankan Snouch Hurgronje, sebagai mana yang ditulis Aqib Sumitro Dalam Politik Islam Hindia Belanda;

Dalam Hubungan dengan Politik Asosiasi, sementara pihak kolonial menginginkan agar pendidikan Barat merupakan jembatan terjadinya asosiasi dikalangan pribumi, dalam rangka menyiapkan orang-orang pribumi sebagai partner dan pegawainya. Namun dikalangan pribumi sendiri ternyata pendidikan Barat justru banyak melahirkan inteligensia berjiwa nasional. Memang beberapa pribadi berhasil memenuhi harapan asosiasi tetapi seluruh tokoh nasionalis sekuler bisa dikatakan dibesarkan oleh pendidikan Barat. Disamping itu tidak semua pribumi yang ditempa dalam pendidikan dan lingkungan Barat itu otomatis melupakan Indonesia. Juga tidak sedikit jumlah inteligensia hasil pendidikan Barat yang berjuang melalui gerakan nasionalis Islam, bahu membahu dengan alumni pesantren dan lulusan timur tengah<sup>1</sup>

Kesadaran politik di Indonesia dapat dilihat dengan bangkitnya Nasionalisme Indonesia dekade pertama abad ke-20 yang memunculkan gerakan gerakan perlawanan rakyat menentang

---

<sup>1</sup> Aqib Sumitro, Politik Islam Hindia Belanda , Pen. LP3ES , Jakarta, Cet. III. 1996, h. 200-201

kolonialis Belanda, bahkan lebih jauh lagi adanya perlawanan secara lokal terhadap kolonial, merupakan bentuk kesadaran politik Bangsa Indonesia. Tetapi sejak abad ke 20-an, gerakan politik Indonesia lebih bersifat nasionalisme dan Islam merupakan kekuatan pemersatu.

Eksistensi Islam di Indonesia tidak sekedar kesadaran nasional, tetapi memiliki keterkaitan dengan gerakan politik ditingkat global. Syarikat Islam (SI)<sup>2</sup> oleh tiga serangkai; Cokro Aminoto, Agus Salim dan Abdul Moes dengan tegas mengatakan bahwa, Islam adalah ideologi partai dan mereka menggerakkan partai sejalan dengan gerakan Pan-Islamisme timur tengah<sup>3</sup>. Sejalan dengan berbagai pemikiran politik dimasa itu, umat Islam digerakkan semangat Idealisme yang melibatkan politik Islam klasik sebagai corak politik yang paling ideal tentang Negara dimana sudut pandang politik berada pada tataran ideologis-filosofis yang berada diluar wilayah praktis politik dan kenegaraan.

Diskursus Intelektual Pemikiran Politik Islam Indonesia khususnya menyangkut gagasan tentang hubungan Islam dan Negara yang beranggapan, bahwa masalahnya berhubungan erat dengan dimensi Teologi-Filosofis Politik Islam, dalam pandangan mereka dasar-dasar teologis-filosofis itu seharusnya merupakan produk pemahaman kaum muslimin atas doktrin ajaran Islam terutama

---

<sup>2</sup> Syarikat Islam, sebelumnya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1911, dan dibawah pimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim dan Abdul Moes Menjadi SI (Syarikat Islam) dan sebagai organisasi politik pertama yang menuntut kemerdekaan .

<sup>3</sup> Bakhtiar Effendy, Islam dan Negara , Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Pen. Para Madina , cet, I. 1998 h. 67. Ulasan tentang Pan-Islamisme , Lihat H. Aqib Sumitro, Politik Islam Hindia Belanda Pen, LP3ES, cet. I. 1985, h. 97



generasi awal.<sup>4</sup> Pada sisi lain Umat Islam memandang bahwa Islam melingkupi semua aspek kehidupan termasuk mengenai politik, karena itu konstruksi politik harus berwatak Islam, Islam bersifat holistik, sehingga pandangan tentang Negara, sama halnya dengan pandangan terhadap Islam (*ad-Din wa ad-Daulah*).

Umat Islam (juga non Islam) pada umumnya mempercayai sifat holistik Islam, sebagai instrumen ilmiah untuk memahami dunia, Islam seringkali dipandang sebagai lebih dari sekedar agama. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai Masyarakat Madani, atau peradaban yang lengkap, bahkan agama dan Negara.<sup>5</sup>

Watak teologi politik umat Islam yang demikian merupakan pemikiran intelektual Islam khususnya mereka yang berpendidikan santri (sebagian intelektual berpendidikan sekuler). yang terlihat dalam kelompok Masyumi (1945-1960). Dalam organisasi inilah M. Natsir banyak menyumbangkan pikiran maupun karya nyatanya dalam politik dan agama. Pemikiran-pemikiran politik M. Natsir dan kawan-kawannya seangkatan sangat berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan politik Masyumi. Dalam hal ini M. Natsir akan menjadi subjek penelitian.

M. Natsir lahir di Alahan Panjang Sumatera Barat, 17 Juli 1908, seorang negarawan Muslim, ulama, intelektual, pembaru dan politikus Muslim Indonesia yang kenamaan dan disegani, bergelar Datuk Sinaro Panjang, ayahnya bernama Idris Sutan Saripado, seorang

---

<sup>4</sup> Sulastomo, Dkk. Kontekstual Ajaran Islam (Ed) 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA. Pen. Para madina. Cet. I. 1995. H. 404.

<sup>5</sup> Bakgtiar Effendy, h. 6

pegawai pemerintah Belanda. Ibunya bernama Khadijah dari keturunan suku Caniago. Ketika berusia 8 tahun M. Natsir belajar pada HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Dan Adabiyah di Padang, tinggal bersama makciknya, kemudian ia dipindahkan oleh orangtuanya ke HIS pemerintah di Solok dan tinggal di rumah Haji Musa, seorang saudagar, disini ia banyak menerima ilmu. Pada malam hari ia mengaji alquran, pagi hari belajar ke HIS dan sore hari belajar di madrasah diniyah. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke HIS Padang dan tinggal bersama kakeknya. Pada tahun 1923 ia meneruskan pendidikan ke MULO (*Meer Uidgebreit Lager Onderwijs*), setingkat SMP di Padang, disini ia menjadi anggota JIB (*Jong Islamic Bond*), cabang Padang. Tahun 1927 ia melanjutkan ke AMS (*Al Gemene Middelbare School*), setingkat SMA di Bandung.

Di MULO dan AMS ia mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda, selama di AMS ia tertarik untuk menekuni ilmu pengetahuan agama, waktu luangnya digunakan untuk belajar agama pada persatuan Islam dibawah bimbingan ustaz A. Hasan, ia lulus dari AMS pada tahun 1930, nilai prestasi yang diperolehnya memungkinkannya untuk mendapat beasiswa kebangku perguruan tinggi.

Sejak di MULO ia sudah mengenal semangat perjuangan, ia menjadi anggota kepanduan pada JIB, ketika di AMS ia menjadi anggota JIB cabang Bandung, kemudian menjadi ketua (1928-1932). Selanjutnya ia berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti H. Agus salim, Wihono Purbohadidjono dan Samsurijal. Pada masa kemerdekaan menjabat sejumlah kedudukan penting, sebagai direktur pendidikan

Islam (1932-1940) di Bandung, Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung (1942-1945). Anggota badan pekerja KNPI (1945-1946), duduk dalam kabinet Syahrir dan Hatta, menjadi menteri penerangan RI, ketua Umum Masyumi (1949-1958). Menjadi Perdana Menteri RI (1950-1951). Anggota DPR RI pemilu 1955. Anggota Konstituante (1956-1958). Deputi Perdana Menteri PRRI, sampai akhirnya tahun 1960 ditangkap pemerintah Soekarno.

M. Natsir seorang penulis, da'i, guru dilyang merupakan bentuk seorang intelektual disamping seorang politikus ulung sebagai mana yang dikutip oleh Deliar Noer;

Menurut M. Natsir, Islam bukan semata-mata religi yaitu agama dalam pengertian rohaniah saja, Islam merupakan pedoman falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik. Menegakkan Islam tidak dapat dengan membiarkan pembinaan masyarakat dan Negara dengan cara dan faham lain. Oleh sebab itu dalam revolusi umat Islam di Indonesia bukannya dijiwai aspirasi nasional, melainkan juga oleh aspirasi Islam<sup>6</sup>

Dimasa awal kemerdekaan terlihat kontroversi dengan ideologi politik nasional yang memisahkan agama dengan politik (Negara). Kontroversi ini berlanjut dimasa Orde Lama (1945-1966) dan mendapat tekanan dimasa Orde Baru (1966-1999), selama itu posisi politik Islam terus merosot hingga tahun 1984, PPP menerima asas tunggal dan pada saat yang sama NU kembali ke khittah 1928. Oleh para pengamat politik Islam sebagai sinyal berakhirnya era bagi

---

<sup>6</sup> Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Pen. Pustaka Utama Grafiti. Cet. I 1987 h. 126, di kutip dari M. Natsir, Islam sebagai Ideologi (ed). ke2., Jakarta, Penyiaran Ilmu, 1951. h. 126

politisi Islam dan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia<sup>7</sup> didalam ketertekanan Islam politis atau kaum Islamis dimasa Orde Baru.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti menetapkan judul penelitian ini, *Pemikiran politik M. Natsir; Analisis dan Interpretasi Politik Islam dimasa Orde Lama dan awal Orde Baru*

#### B. Rumusan Masalah

Pergulatan idiologi politik seiring dengan pembentukan rumusan Kebangsaan Indonesia yang mementaskan wacana intelektual, kalau bukan kontroversi pemikiran tentang Islam dan politik (Negara) dapat disebut sebagai upaya menemukan konsepsi yang tepat untuk mendudukan posisi Islam dalam paradigma kenegaraan oleh kelompok nasionalis sekuler (netral agama) dengan nasionalis Islamis khususnya Soekarno dan M. Natsir tahun 40-50-an

Sejumlah gagasan pemikiran telah dilontarkan M. Natsir dari kelompok Islamis, yang sarat dengan format idealisme dan kekonsekwenan terhadap ideal Islam, sebagai konsekwensi terhadap posisi politik Islam sepanjang pemerintahan Orde Lama dan berimbas kepada paroh pertama Orde Baru. Yang akan diteliti adalah intelektual dan konstruk pemikiran politik M. Natsir, dengan menelusuri dasar-dasar teologi politik, ciri khas dan pergeseran politik sepanjang sejarah politiknya. Dengan demikian peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebgai berikut:

---

<sup>7</sup> Dedi Jamaluddin Malik, Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia , Pemikiran dan Aksi Politik* pen. Zaman Wacana.Cet. 1998 h. 45.Lihat juga Bakgtiar Effendy. h. 132

1. Bagai mana idiologi politik M. Natsir
2. Dari manakah sumber-sumber pemikiran politik M. Natsir.

Dengan rumusan penelitian ini akan ditelusuri hal-hal sebagai berikut; landasan pemikiran politik M. Natsir, sumber-sumber pemikiran yang mempengaruhi format pemikiran politiknya, dan konteks dimana pemikiran politik itu muncul dan berkembang.

*C. Tujuan dan kegunaan penelitian*

*a. Tujuan:*

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, untuk mengetahui dasar-dasar teologi politik M. Natsir

Kedua, untuk mengetahui bagai mana pemikiran politik M. Natsir tentang hubungan agama dan politik (Negara)

Ketiga, untuk dapat mendudukan posisi pemikiran intelektual M. Natsir sepanjang kapasitasnya sebagai pemikir intelektual

*b. Kegunaan:*

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai dasar-dasar bagi pembentukan format idiologi politik yang harus dimiliki politikis muslim, dan berguna untuk mendudukan Islam dalam politik nasional yang serasi. Meski dalam konteks kekinian persoalan hubungan agama dan politik tidak menjadi perdebatan dikalangan intelektual, tetapi hal ini akan tetap menjadi isu yang berkembang dimasa yang akan datang.

D. *Kajian awal kepustakaan*

Kajian awal kepustakaan dapat dilihat dalam literatur sebagai berikut:

M. Syafii Anwar, *Pemiiran dan Aksi Islam Indonesia, sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru*, buku ini menjelaskan berbagai corak politik intelektual muslim, sosio-ekonomi dengan mengungkapkan pendekatan corak pemikiran keislaman sebelum dan semasa Orde Baru hingga terbentuknya ICMI (sumber primer)

Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap pemikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Negara*. Buku ini menyimak pemikiran politik kedua intelektual dan pergeseran-pergeseran pemikiran politiknya dengan analisis perbandingan

Dedy Djamaluddin, Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nur Kholish Majid, jalaluddin Rahmad*, Ulasan karya ini memuat wacana pemikiran politik, sosial dan budaya sejak mencuatnya Orde Baru yang cenderung pragmatis dengan indikasi produk pemikiran Islam ditopang oleh perubahan-perubahan realitas sosial, budaya, ekonomi dan politik

Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan Prantik Politik Islam di Indonesia*, Buku ini membahas hubungan Islam dan Negara Indonesia yang diilhami oleh fenomena pasca kolonialisme Barat dinegara-negara muslim semenjak pertengahan abad ke 20, analisis tentang Indonesia ternyata tidak berbeda seperti dinegara-negara Islam; Turki,

Mesir, Sudan, Al-Jazair, Pakistan, Marokko, Malaysia, disamping itu pemikiran tokoh-tokoh intelektual tentang hubungan Islam dan politik (Negara)

*Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir* (ed) buku ini menjelaskan seputar pemikiran dan kepeloporan M. Natsir dan dialognya dengan politik khususnya, umumnya berbagai pemikirannya tentang sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

M. Natsir, *Capita selecta*, buku ini banyak menjelaskan tentang pemikiran, politik dan idiologi M.Natsir, disamping argumentasinya tentang agama dan Negara, termasuk dialognya dengan Presiden Soekarno tentang Islam.

Adapun buku buku lainnya seperti:

*Cendekiawan dan Politik* disunting oleh Aswab Mahasin dan Ismed Nasir LP3ES 1984

*Nasionalisme amuhammad, Islam menyongsong Masa depan* oleh Emha Ainun Najib, penerbit Sipres 1995

#### E. *Metode Penelitian*

Bentuk penelitian ini adalah bersifat kualitatif karena itu metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan studi kepustakaan, sedang pendekatan yang digunakan adalah historis-analisis. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menelusuri aktivitas intelektual, sehubungan dengan realitas politik yang berkembang pada masanya.

Metode analisis-deskriptif ini berguna untuk mendeskriptifkan pola intelektual sehubungan dengan pakta pemikiran intelektual terhadap dinamika dan keterlibatan politik yang diperankan M. Natsir

sehingga dapat menggambarkan secara umum pemikiran intelektual, idiologi politik, keterlibatan politik dan pandangannya yang mendasar tentang hubungan agama dan politik (Negara).

#### *F. Sistematika Penelitian*

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan akan di uraikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , kajian pustaka,

Bab kedua, akan dibahas latar belkang intelektual Islam yang menguraikan faktor politik kolonialisme, pergulatan idealism politik dimasa Orde Lama dalam pencarian identitas, paktor stabilitas dimasa Orde Baru dan paktor kondisi dunia Islam pada pertengahan abad ke-20.

Bab ketiga, Biografi M. Natsir, akan menjelaskan sosok M. Natsir, idealisme politik Islam, Idiologi polik M. Natsir dan perspektif politik Islam; Islam dan politik, nasionalisme Islam.

Bab keempat, adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran



## BAB II

### LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

#### *A. Pemikiran Politik Islam Abad ke-20*

Kondisi dunia Islam abad ke-20 tidak terlepas dari rangkaian situasi dari abad-abad sebelumnya, bahkan jauh kemasa-masa pertengahan dan klasik Islam, dimana bentuk-bentuk pemikiran Islam, sosial, politik masih tumbuh di dunia Islam abad ke-20, meski dalam beberapa hal dari fenomena yang terlihat mensintesa atau hilang dari tradisi umat Islam, bahkan mengambil bentuk-bentuk baru yang tidak ada sebelumnya, sejarah Islam terangkai dengan kekhususannya dengan perkembangan yang mengagumkan dimasa klasik, dimasa pertengahan mundur secara mengejutkan dan bahkan jatuh dibawah kekuasaan kolonial sejak abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Dengan sentuhan pemikiran Barat, umat Islam melihat dunia Islam yang sangat mundur dalam lapangan sosial, ekonomi, agama, budaya khususnya politik sehingga isu besar mencuat pada abad 19, adalah masalah Islam dan politik (nasionalisme), disamping aktivis Islam untuk menggalang persatuan dan upaya memisahkan diri dari kolonialisme dan imperialisisme Barat.

Hingga abad ke-18 sering dipandang sebagai abad kegelapan sejarah Islam, gambaran ini berpangkal dalam perpecahan dalam pemerintahan kesultanan serta kemerosotan secara umum dunia Islam. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai sebahagian dari pengalaman Islam, karena abad ke-19 merupakan periode

hilangnya kekuasaan Islam dan mereka berada dibawah kekuasaan pemerintahan kolonialis Barat.<sup>8</sup>

Kesadaran eksistensi umat Islam memperoleh momentumnya meski berada dalam tekanan politik di negerinya sendiri umat Islam terobsesi dengan sejarahnya dimasa klasik Islam, dengan meneliti sebab-sebab kemerosotan umat Islam dan sebab-sebab kemajuan Barat yang spektakuler, sehingga bangsa-bangsa Barat mampu menaklukkan dunia Islam dan menguasainya dengan kuat secara politik. Keprihatinan ini melahirkan pemikir Islam yang melihat betapa seriusnya persoalan umat Islam dalam tekanan politik kaum kolonial Barat. Oleh Jamaluddin Al Afghani (1839-1897) merupakan malapetaka bagi umat Islam, bagaimana bangsa-bangsa Barat melakukan campurtangan terhadap masalah-masalah umat Islam dinegerinya sendiri. Al-Afghani melihat pertama kali dinegaerinya Afghanistan, India, Mesir dan Iran, ia menyaksikan hal yang serupa yang menebalkan keyakinannya bahwa dunia Islam sedang menjadi permainan politik bangsa penjajah Barat, khususnya Inggris dan merupakan ancaman yang serius bagi dunia Islam.<sup>9</sup>

Kekhawatiran Al-Afghani cukup beralasan dilihat dari posisi umat Islam yang dalam beberapa hal sangat lemah dan merupakan aspek kemunduran kaum muslimin. Para tokoh kebangkitan Islam menyebutkan empat sebab utama. Pertama, Erosi nilai-nilai Islam dan ketidak perdulian pemerintah untuk menerapkan peraturan sosio-

---

<sup>8</sup>John Obert, Voll. Politik Islam; Kelangsungan dan perubahan didunia Midern, Pent. Ajad sudrajat, cet. 1, pen. Titian Ilahi Press, 1997. h. 59

<sup>9</sup>Dewan redaksi, Ensiklopedi Islam, pen. FT. Ikhtian Baru Van Hove, Jakarta, cet. LV, 1999, h. 80.

ekonomi dan etika Islam. Kedua, Sikap diam dan kerja sama lembaga ulama dengan pemerintah yang pada hakikatnya tidak Islam. Ketiga, Korupsi dan kezaliman kelas penguasa dengan ketergantungannya kepada kekuatan-kekuatan imperialis yang tidak Islami<sup>10</sup>. Rumusan-rumusan yang muncul pada fase pertama, kebangkitan Islam dilanjutkan dengan upaya-upaya bagai mana menumbuhkan kekuatan politik Islam yang mampu mengangkat isu-isu sosial politik dan agama dalam kondisi ketertekanan Islam itu sendiri menumbuhkan kesadaran ideologi. Kebangkitan Islam dinegeri-negeri Islam, selama fase pertama manifestasinya ditandai dengan bangkitnya perhatian terhadap Islam sebagai ideologi yang memiliki kekuatan pembebas. Fase penyiapan fondasi ini diikuti dorongan untuk menyatakan kembali Islam sebagai mekanisme utama yang mengkoordinasikan masyarakat. Berdirinya Negara Islam barangkali merupakan tujuan paling penting bagi para tokoh kebangkitan Islam. Namun ini tidaklah berarti bahwa semua tokoh kebangkitan Islam berpandangan sama mengenai apa itu Negara Islam dan bagaimana menjalankannya<sup>11</sup>

Perkembangan sosial politik dan agama yang demikian luar biasa, ditandai dengan serentetan upaya modernisasi pemikiran Islam, usaha pemikiran dan reformasi pandangan Islam ini tumbuh dan berkembang di hampir seluruh dunia Islam dengan keterlibatan sejumlah tokoh dan pemikir serta gagasan mereka. Gagasan itu lahir sebagai reaksi dan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi

---

<sup>10</sup> Para Perintis Zaman baru Islam (ed) Ali Rahmena; dari buku, Pioneer Of Islamic Revival, pent. Mizan, cet. II, 1996, h. 11

<sup>11</sup> Ibid. h. 10

sosial, politik dan agama yang telah terkubur dan hamper tidak memiliki dinamika lagi. Sejak abad ke-19-20 itu muncul ide-ide baru yang diinspirasi semangat pemikiran Barat<sup>12</sup>. Namun tetap konsekwen terhadap Islam. Para pemimpin telah bekerja keras untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperbaiki struktur pemerintahan dan meningkatkan peranannya dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah baru. Teknik-teknik dan metode digunakan oleh para penguasa yang tidak dilakukan oleh tradisi masa lalu, mereka ingin melakukan penyesuaian dan mengadopsi segala sesuatu yang potensial untuk memperkuat pemerintahan mereka dan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pada abad 19, sumber-sumber pemikiran bagi tipe pembaharuan ini adalah Barat. .... Pemikiran-pemikiran dan teknik-teknik yang relatif baru baik bagi para pembaharu dan masyarakat, tetapi peran elit politik secara mendasar merupakan kelanjutan dari bentuk Islam adaptif. Tidak satupun pembaharuan yang meninggalkan Islam<sup>13</sup>

Selama abad ke-19-20an dunia Islam menampilkan pergolakan dengan corak-corak pemikiran, baik yang mengacu kepada periode awal (klasik) Islam yang menginginkan akomodasi antara Islam dan pemikiran barat (modern) dan yang bercorak sekuler. Khususnya dalam masalah politik (Negara) dan agama. Dalam hubungan ini dikenal bentuk *simbiosis-mutualisme*, yakni adanya

<sup>12</sup> John Obert Voll, Op.Cit. h. 125

<sup>13</sup> Munculnya gerakan baru dalam pemikiran Islam, tidaklah semata-mata karena sentuhan Barat, tetapi juga didorong oleh ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Lihat, John I. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, dalam Kata pengantar oleh Amin Rais, pen. Rajawali Priss. Dari Buku, Islam Intransition Muslim Perspektif, pent. Mahmud Husein, cet. II, 1989, h. XII

hubungan dan ketergantungan yang kuat antara agama dan Negara, demikian sebaliknya. Hubungan yang didalamnya terdapat *kontradiktif-antagonistik* dan hubungan yang bersifat lentur, *pleksibel akomodatif atau resiprokal-kritis*, hubungan yang saling memahami antara posisi keduanya (agama-negara). Dalam konteks dunia Islam muncul tipologi politik Islam dalam tiga tipologi sebagai mana yang disebutkan Ma'mun Murod al-Brebesy.

Pertama, aliran pemikiran politik yang berpendirian bahwa Islam bukan agama sebagai mana dalam pengertian Barat yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk menyangkut kehidupan bernegara. Didalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan. Karenanya menurut aliran ini dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistim tatanegara Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistim tata Negara sebagaimana diterapkan dunia Barat. Sistim tata Negara yang harus diteladani adalah sistim tata Negara yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad saw. dan kekempat sahabatnya. Kedua, aliran pemikiran politik yang berpendirian bahwa Islam sebagai mana agama dalam pengertian Barat yang tidak berkaitan dengan urusan kenegaraan .... Kehadiran Muhammad saw. sebagai rasul tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan ataupun mengepalai suatu Negara, disebut dengan sekulerisme, yaitu suatu faham yang berusaha untuk memisahkan persoalan-persoalan keagamaan dan persoalan kenegaraan atau politik. Ketiga, aliran pemikiran politik yang menolak pandangan Islam sebagai agama yang

serta lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, namun berbeda dengan aliran kedua, aliran ini menolak Islam sebagaimana agama dalam pengertian Barat. Aliran ini berpendirian bahwa dalam alquran tidak terdapat sistim politik tetapi terdapat seperangkat nilai, etika bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu sistim politik<sup>14</sup>

Tipologi pemikiran tersebut terlihat diberbagai wilayah kekuasaan Islam, Mesir, Turki, India/Pakistan, adapun beberapa wilayah seperti Tunisia, Marokko, Aljazair, tampaknya mengacu kekuasaan diatas dan Asia Tenggara khususnya Indonesiatampak lebih beragam dalam menanggapi perkembangan politik Dunia Islam. Tipologi pemikiran politik pertama terwakili oleh beberapa pemikir seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abul A'la al-Maududi serta Muhammad Qutb dengan Ikhwanul Muslimin, meski perumusannya diantara pemikir politik memiliki perbedaan-perbedaan, tetapi tampak ada kesamaan arah, Muhammad Rasyid Ridha misalnya tampak masih mempunyai keinginan untuk mengikat umat Islam lewat Jamaah Islamiyah (Pan-Ismaisme), sementara Abul A'la al-Maududi mendasarkan pemikirannya pada tiga hal; Pertama, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Kedua, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya ditangan Allah dan umat Islam hanyalah pelaksana kekuasaan Allah atau khalifah Allah di Bumi. Ketiga, sistim politik Islam ialah sistim politik yang universal dan tidak

---

<sup>14</sup>Ma'mun Murod al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais tentang Negara, pen, PT Raja Grafindo Persada, cet. I Jakarta. 1999, h. 4-8

mengenai batas wilayah ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan<sup>15</sup> Maududi memandang Islam sebagai ideologi holistik seperti ideologi Barat yang dianut pemimpin intelektual muslim. Bukan saja ideologi Barat itu asing bagi pandangan dunia muslim, tapi juga tidak memadai bagi kepentingan muslim dan lebih-lebih mengancam kepentingan muslim<sup>16</sup> tampaknya pemikiran al-Maududi berakar kepada Tauhid, ia menganggap bahwa konsepsi itu merupakan konsepsi tentang Tuhan yang benar dan asli sebagai mana diterangkan semua nabi dan rasul Allah. Bagian pertama dari kepercayaan Islam adalah; Tidak ada Tuhan melainkan Allah, suatu pernyataan yang tampaknya mengakui dengan kukuh tentang ke-Esaan sang pencipta. ...konsepsi tentang Tuhan dengan penekanan sebagai satu-satunya zat yang berkuasa dan memberi hukum, memberikan prinsip pokok otoritas...tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seantero hidup manusia ini sesuai dengan kemauan Tuhan yang diwahyukan. Adapun manusia sebagai makhluk Tuhan, ia harus tunduk dan patuh kepadanya. Bukan hanya itu Tuhan telah memilih manusia sebagai mana yang disebutkan dalam alquran ....sebagai wakil Tuhan di bumi ...dalam kapasitas sebagai wakil Tuhan di bumi, ia juga harus mengikatkan diri kepada yang diwakili.<sup>17</sup>

Sedangkan Muhammad Qutb berpandangan, pertama, dunia Islam merupakan kesatuan sistem politik dibawah pemerintahan supranasional dengan sistem sentralisasi..... Kedua, adanya persamaan

<sup>15</sup>Ma'mun Murod al-Brebesy, h. 5. Bandingkan dengan Mukti Ali . Alam pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Pen.Mizan, cet. III.1996, h. 249.

<sup>16</sup> Ali Rahmena, h. 109

<sup>17</sup> Ali rahmena. h. 224

hak. Ketiga, pemerintahan dalam Islam didasarkan atas tiga asas yaitu; Kedaulatan penguasa, kedaulatan rakyat dan asas permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.<sup>18</sup> Sebagai mana yang dikutip Ali Rahmena dalam buku *al-Adha al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (1949), perhatian liberal dipadukan dengan perhatian orang yang cemas melihat kondisi masyarakat Islam. Namun dalam tulisannya dikemudian hari Qutb semakin bergerak keposisi dimana keadaan posisi ini dan otoritas yang mendukung eksistensinya harus lebih diutamakan atas pertimbangan lainnya. Dibawah logika argumennya sendiri pada saat dia menulis *Ma'alim fi ath Thariq*, Qutb meninggalkan gagasan individu yang pada mulanya dianutnya dan semakin bergerak keposisi dimana umat secara logis dan etis mendahului semua individu yang membentuk umat itu. Implikasi hal ini bagi visi politik Qutb ada dua. Pertama, politik kini kira-kira tak kurang dari menciptakan keserasian Ilahiyyah didunia ini. Kedua, berpolitik berarti menangkap secara intuitif pengetahuan tentang kebenaran mutlak ini, polanya dan keselarasannya diikuti dengan pembentukan kembali secara radikal masyarakat manusia yang sesuai dengan ritmenya.<sup>19</sup>

Tipologin pemikiran politik Islam terlihat dalam pemikiran-pemikiran seperti; Ahmad Lutfi Asayyid (1872-1963)M. Thaha Husein (1889-1973)M. Ali Abd al Raziq(1888-1966)M. Mesir yang dikenal sebagai kampiun demokrasi sejak awal kedatangan Barat telah mengenal pemikiran-pemikiran Barat yang sekuler, sehingga pemikir-pemikir yang muncul bersifat *west oriented*, sejak pemerintahan

<sup>18</sup> Ma'mun Murod al-brebesy, Op.Cit, h. 5-6

<sup>19</sup> Ali Rahmena (ed), h. 165-166.



Muhammad Ali, telah mengirimkan mahasiswa ke Barat. Thaha Husein sendiri belajar ke Paris dan Ali Abd.Al Raziq belajar di Universitas Oxford Inggris. Thaha Husein melihat alquran tidak menhatursistim pemerintahan , baik secara umum maupun khusus. Dengan demikian baik pemerintahan pada masa rasulullah maupun khalifah-khalifah sesudahnya bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, melainkan pemerintahan insani, sehingga tidak pantas dianggap sacral... seandainya pemerintahan itu berdasarkan wahyu Allah, tentunya tidak seorangpun akan diajak musyawarah oleh Nabi, maupun oleh keempat khalifah penggantinya.<sup>20</sup> Umat Islam sadar terhadap suatu prinsip yang sekarang ini telah diakui secara universal bahwa sistim politik dan agama itu dua hal yang terpisah.<sup>21</sup> Thaha Husein melihat sistim pemerintahan merupakan suatu hal yang bersifat rasional dan praktis, dengan memisahkan pemerintahan dari Agama merupakan kebutuhan alamiah. Adapun agama adalah suatu yang lain, begitupun pemerintahan adalah suatu yang lainnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini umat Islam tidak harus mencontoh pola pemerintahan klasik Islam, melainkan kebebasan untuk memilih system pemerintahan yang memajukan, untuk itu perlu memisahkan antara agama dan negara sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan antara keduanya. Sementara tipologi ketiga diwakili oleh Muhammad Abduh (1849-1905)M. dan Muhammad husein Haikal (1888-195)M. Visi politik

<sup>20</sup> Ma'mun Murad al Brebesy, h. 67

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, pen. UI Press, cet. II, 1998, h. 138-139, Lihat tesis Doktor Syahrin Harahap.

<sup>22</sup> John. L. Esposito. Ancaman Islam Mitos atau realitas, dari Buku Islamic Tread, Mythos or Reality, New York 1992, Edisi revisi .pen. Mizan. 1994. H. 73

Abdullah terlihat bahwa dalam Islam tidak ada otoritas final selain otoritas Allah dan Nabi, dalam Islam tidak ada otoritas kecuali.....mengajak ke kebenaran dan mencegah kemungkaran. Inilah otoritas yang diberi Allah swt kepada orang-orang yang paling rendah hati diantara kaum muslimin. Dengan otoritas ini mereka menghadapi orang-orang yang paling angkuh. Otoritas ini juga diberikan kepada orang terkemuka diantara mereka. Bingkai pemikiran Abdullah ini masih mencirikan pemerintahan Islam dari pemikiran gurunya al-Afghani, melihat alquran tidak mengkonsepsikan bentuk pemerintahan, melainkan seperangkat nilai-nilai yang termuat didalamnya, tetapi tidak pula memisahkan agama dari negara seperti yang dipraktekkan Bangsa-bangsa Barat. Ciri pemerintahan Islam adalah bersifat simbiosis adanya saling ketergantungan antara keduanya. Dalam hal ini tidak pula berbentuk pemerintahan agama, semacam Paus yang dalam jabatannya berpadu peran keagamaan dan sipil. Syariat menggariskan hak maupun batasan bagi kekuasaan otoritas tertinggi dalam Islam. Seperti penguasaentah itu khalifah ataupun sultan. Pemikiran politik Abdullah terlihat berada diantara Islam yang melihat adanya bentuk pemerintahan agama dan bentuk sekuler.

Pemikiran Haikal tentang politik (kenegaraan) sebagai mana yang dikutip Munawir Sjadzali, dalam buku al-Hukumiyyah al-Islamiyyah (pemerintahan Islam) bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan ....dua ayat alquran yang memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi satu sama lainnya dalam soal-soal bersama (surat Ali Imran ayat 159 dan as-Syura ayat 38) itu tidak diturunkan dalam kain sistim pemerintahan....

Pemikiran haikal tentang politik bercorak liberal, umat Islam tidak perlu kembali melihat bentuk pemerintahan klasik Islam, sebab sangat beragam dan bersifat situasional (kontekstual), umat Islam harus melihat yang terbaik bagi dirinya pada saat ini, yang menjamin hak-hak dan kewajiban dengan prinsip-prinsip Islam yang berangkat dari ketauhidan, keadilan, kemerdekaan dan persamaan derajat dengan kata lain menurut Haikal, system pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistim yang menjamin kebebasan dan berasaskan prinsip bahwa pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaannya harus persetujuan rakyat, bahwa rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban<sup>23</sup>

Tipologi pemikiran politik yang terlihat dari pemikir-pemikir Islam secara umum menggambarkan idiologi yang sama terhadap konsistensinya terhadap Islam, perbedaan mereka terletak pada hubungan antara Islam politik (negara) dan bagai mana posisi agama (Islam) sebagai pandangan hidup

## B. *Masa Kolonial*

### a. Politik Asosiasi

Bagian terakhir abad ke-20 bergaung keinginan umat Islam untuk mendirikan pemerintahan sendiri, hal ini dilihat penjajah sebagai tantangan untuk mempertahankan domenasi kolonial mereka atas tanah jajahan yang nota bene umat Islam, kecaman atas politik liberal yang diterapkan di Indonesia, seiring dengan Pan-Islamisme

---

<sup>23</sup> Munawir Sjadzali, h. 188-189

yang telah mendapat perhatian besar dinegeri-negeri muslim, maka sejak tahun 1970 sistem tanam paksa (*Culture Stelsel*), dalam politik liberal yang merupakan eksploitasi tidak etis oleh perusahaan-perusahaan swasta dihentikan, kecaman itu munculdari kaum sosialis Belanda dan ini mendapat perhatian dari pemerintah, disamping munculnya Jepang sebagai kekuatan tandingan memaksa pemerintah kolonial mengubah sistim politiknya dinegeri jajahan.

Permulaan abad ini mencatat apa yang dinamakan politik etis pemerintah yang tidak melihat Indonesia semata-mata sebagai daerah yang dieksploitasi demi keperluan negeri Belanda saja, melainkan juga untuk kemakmuran penduduk, meski secara paktual tidak pernah terwujudkan, namun secara teoritis telah mengubah peta politik pemerintah kolonial, istilah-istilah barupun muncul yaitu, univikasi, asimilasi dan asosiasi.

Univikasimerupakan suatu istilah hukum dan bukan merupakan pengertian tentang hubungan sosial pada umumnya. Mulanya pengertian univikasi berarti hapusnya peraturan-peraturan yang berbeda bagi daerah yang bermacam-macam seperti; struktur hukum dan pajak. Setelah tahun 1900istilah ini mengandung suatu usaha untuk mendirikan suatu sistim legislatf seperti dalam bidang administrasi kepegawaian, pendidikan, pajak dan sebagainya untuk semua golongan penduduk baik Erofa maupun Indonesia dengan didasarkan kepada ukuran yang berlaku bagi golongan Erofa.

Asimilasi mengandung arti bahwa keperluan-keperluan Hindia akan dipenuhi dengan syarat-syarat Barat...(sedang) asosiasi mengandung maksud bagai mana mengikat negeri jajahan dengan

negeri penjajah. Dalam hubungan ini kebudayaan dianggap merupakan sarana yang sangat efektif, manfaat kebudayaan negeri penjajah akan terbuka untuk dipergunakan oleh negeri yang dijajah.<sup>24</sup> Dalam konteks asosiasi ini oleh cristian snouch Hurgronje diperjuangkan untuk memberi peluang bagi orang-orang Indonesia yang secara akademis mendapat pendidikan Barat, dan secara teoritis mendapat tujuan asosiasi bukan saja untuki menarik simpati pribumi, melainkan sekaligus upaya kristenisasi dan untuk menguatkan kekuasaan kolonialis di Indonesia. Menurut Snouch Hurgronje akan menjamin kekalnya loyalitas mereka. Ditegaskannya pula bahwa asosiasi akan menghilangkan cita-cita Pan-Islam dari segala kekuatan, tetapi asosiasi yang diterapkan tidak serta merta menyelur bagi pribumi, khususnya dalam pendidikan, kolonialis Belanda memilih golongan yang memang selama ini, dimana pengaruh mereka telah tertanamkan dank arena itu hanya menyentuh segelintir masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berafiliasi dengan perkumpulan *Nederlandsch Indische VrijzinningenBond* (Kesatuan kaum liberal Hindia Belanda),<sup>25</sup> dan anak-anak bangsawan ... , dalam program ini pula kalangan bangsawan diharapkan Snouch Hurgronje mampu menjadi pewaris pola asosiasi, untuk selanjutnya menjadi partner dalam kehidupan sosial b udaya.<sup>26</sup> Dasar pemikiran pemilihan sasaran

<sup>24</sup> Deliar Noer, gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Cet. II, dari Buku *The Modern est uslim Movement In Indonesia, 1900-1942* pen. LP3ES , pent. Deliar Noer. h. 181-182

<sup>25</sup> Aqib Sumitro , Politik Islam Hindia Belanda, dikutip dari Bernard HM. Vlekke , *The Story of Dutch East Indie, Cambridge 1946*, h. 174 , pen. LP3ES, cet I, 1985, h.

40

<sup>26</sup> Deliar Noer. h. 182

asosiasi dalam pendidikan ini terlihat atas pertimbangan bahwa lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi ini relative jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh Barat yang mereka miliki akan mempermudah mempertemukannya dengan pemerintah Erofa.

Politik asosiasi dalam pendidikan, meski terlihat sepenuhnya bertujuan demi kolonialisme, namun telah membuka babakan baru bagi bangsa Indonesiadalam hal meningkatkan sumberdaya manusianya. Secara akademis membuka wawasan berpikir serta identitas dirinya. Diantara kader terdidik ini ada yang telah mencapai gelar doktor yakni Hosein Djaja diningrat dengan prestasi *Cumlaude* di Leiden, sebingga secara resmi dibiayai oleh pemerintah Belanda sampai tahun 1931 yang kemudian oleh pemerintah Belanda melakukan pembatasan sehubungan dengan kondisi sosio-ekonominya.

Upaya asosiasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk mengutuhkan kolonial diharapkan dapat menjinakkan pribumi disamping upaya menjauhkan mereka dari rasa kengsaan dan keislamannya, ternyata tidak berhasil seperti prediksi dan asumsi mereka, kesadaran agama dan kebangsaan itu muncul lebih besar dengan ruh Islam yang begitu kuat, rasa ukhuh Islamiyah dan rasa agama yang tinggi dari agama lain membuat umat Islam lebih merapatkan barisan dan Islam menjadi pemersatudalam menghadapi kaum penjajah dan kaum Kristen yang dalam pandangan umat Islam adalah kaum kafir, pandanagn ini merebak khususnya dikalangan

kaum santri dan tradisional, Islam menjadi identitas yang membedakan mereka dari penjajah (Kristen).

Hal lain yang mendukung dinamika pergerakan pemikiran di Indonesia adalah perkembangan yang terjadi di level internasional khususnya perkembangan di negeri-negeri Arab. Gaung Pan-Islamisme mengalir dengan deras. Betapapun hubungan umat Islam di kepulauan ini dengan dunia Islam tidak bias dihindarkan, pada tahun 1924, bahkan datang utusan Panitia Khilafah dari India-Inggris bernama Husein Mardini Damsyiki, kedatangannya justru dalam rangka mempropagandakan Pan-Islamisme<sup>27</sup>, dan mendirikan *Jam'iyatul Ittihad al-Islami* atau *de Islamitische eenheid*. Kehadiran Husein Mardini ini merupakan realisasi keputusan konferensi Islam di Bombay pada pertengahan Maret 1923 yang juga dihadiri oleh ulama dari Indonesia ... kenyataan ini membuktikan tidak terisolasinya umat Islam di wilayah ini dari dunia luar<sup>28</sup>. Kemudian dikuatkan lagi dengan para jamaah haji yang setiap tahun kontak dengan dunia Islam yang merupakan pertemuan universal umat Islam, disana mereka membicarakan berbagai masalah menyangkut perkembangan di negeri masing-masing.

Pertambahan Jemaah haji setiap tahunnya meningkat pada pertengahan abad ke-19, setelah menggunakan kapal uap sebagai

<sup>27</sup> Sehubungan dengan Pan-Islam telah diadakan beberapa konres seperti kongres dunia Islam di Kairo tanggal, 13-19 Mei 1926 diprakarsai oleh Raja Fuad. Kongres Khilafah tanggal, 1 Juni 1926 di Mekkah atas prakarsa Raja Ibnu Saud dengan mengirim HOS. Cokroaminoto (SI), dan KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah) tahun 1927. Dan lain-lain

<sup>28</sup> Ibid, h. 92

media transportasi dan diperlancar lagi dengan setelah dibukanya terusan Suez tahun 1869, sehingga tahun 1939, Jemaah haji Indonesia mencapai 10.883 orang<sup>29</sup> hal ini cukup memberikan pengaruh khususnya arah pemikiran dalam menyoroti kondisi keberagamaan menyangkut praktek singkritis agama dan budaya, khurafat dan bid'ah, disamping pemikiran tantang Islam dalam hubungannya dengan kemodrenan, hal ini tidak terlepas dari kontak jemaah haji dengan perkembangan modern, khususnya dari umat Islam Indonesia yang telah bermukim di Arab Saudi, karena itu pemerintah kolonial melakukan pengawasan dan pembatasan secara halus terhadap Jemaah haji Indonesia dan bagi Cristia Snouch Hurgronje masih membedakan antara Jemaah haji biasa dengan Jemaah haji Indonesia yang telah bermukim disana yang sering disebut dengan koloni Jawa, ini merupaka *resrvor* bagi Islam di Indonesia. Mereka terus menanamkan pengaruh dalam kehidupan beragama orang-orang sekampungnya, baik melalui peergaulan langsung dengan para Jemaah haji di Mekkah ataupun melalui hubungan surat menyurat dengan saudar seagamanya ditanah air. Setelah pulangny mereka sering memainkan peranan penting dalam kehidupan beragama dalam lingkungannya.<sup>30</sup>

Kenyataan ini menggambar bahwa perkembangan politik kolonial (Politik Etis) khususnya asosiasi kebudayaan-pendidikan secara internal adalah awal dari keterbukaan pribumi untuk

---

<sup>29</sup> Laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda, tahun 1941, dikutip dari Aqib Sumitro, lihat lampiran politik Hindia Belanda

<sup>30</sup>Ibid. h. 95. Tentang politik Belanda terhadap Jemaah haji, lihat kumpulan karangan Snouch Hurgronje, jilid IX dari Buku *Verspreidegeschriften*. pent Sutan maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta, INIS. 1994. H161-182



memunculkan orang-orang terdidik secara Barat dan gerakan yang timbul ditingkat internasional Islam dengan semangat Pan-Islamisme, meski tidak berhasil tetapi telah membentuk semacam solidaritas diantara negara-negara muslim. Dari politik asosiasi inilah yang melahirkan kaum nasionalis netral agama, selebihnya merupakan alumni timur tengah dan lulusan pesantren di tanah air.

b. *Pra Kemerdekaan: Pergulatan Idiologi Politik*

Detik terakhir kekuasaan Jepang mengubah arah kebijakan politiknya, mereka makin banyak memberi dukungan kepada para pemimpin kubu nasionalis<sup>31</sup> yang sebelumnya mendekati kubu Islam, sehingga dibentuknya Kantor urusan agama (*Shumubu*), Majelis Syuro Musli Indonesia (Masyumi), dan Hisbullah, akan tetapi terakhir menjelang kekalahan militer Jepang, mereka berpaling kepada kelompok nasionalis dan beberapa badan untuk persiapan kemerdekaan diserahkan bukannya pada kelompok Islam, seperti badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zunbi Tyoosakai (BPUPKI) diserahkan kepada kelompok nasionalis, sehingga pergulatan idiologi kembali terbuka yang terjadi sejak tahun 30-an.

Pergulatan idiologi dalam masa-masa pembentukan suatu negara, selalu cenderung kepada pemusatan idealism-filosofis, disebabkan pembentukan asas-asas fundamental bagi terbentuknya suatu negara. Karena itu berbagai elemen yang ada cenderung

---

<sup>31</sup> Bkhtiar effendi, *Islam dan Negara*, h. 84

menonjolkan gagasan itu sebagai akibat logis dari perdebatan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat suatu bangsa. Secara historis Indonesia telah dipengaruhi berbagai pemikiran dari dunia internasional, khususnya dunia Islam, kekuatan itu telah membentuk suatu arus yang secara sistematis mempolakan gagasan yang kuat bagi aspirasi politik bangsa Indonesia, meski kenyataannya memiliki perbedaan dalam aktualisasi politik itu, sesuai dengan arah pemikiran yang bermacam dalam berbagai tipologi yang telah dikemukakan sebelumnya. Disisi lain terlihat tipologi yang tumbuh sejak politik etis kolonial yang cenderung ke Barat. Yang pertama tumbuh dikalangan ulama yang melihat Islam sebagai aspirasi politik dan menjadikan Islam sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan politiknya, hal ini terlihat dalam kelompok Masyumi yang telah berdiri sejak 7 Nopember 1945 di Yogyakarta, dalam Masyumi tergambar unsur-unsur dari umat Islam yang membentuk lintas golongan dalam umat Islam. Ketua Majelis Syuro adalah Hasyim As'ari dan salah seorang wakil ketua adalah putranya, Wahid Hasyim (keduanya dari lingkungan NU), H. Agus Salim (PSII) juga Syekh Djamil Jambek Salah satu dari pembaru Islam Sumatera .....Pengurus besar terdiri dari politisi karir dari Masyumi dimasa datang seperti Sukiman juga abi Kusno Tjokro Sojoso (PSII) Selanjutnya Muhammad Natsir dan Muhammad Roem dan Karto Suwirjo pemimpin Darul Islam yang kemudian memberontak.

Kahin menyifatkan para pemimpin Masyumi yang progresif sebagai kaum sosialis agama yang banyak mengambil ilham dari

ajaran-ajaran Muhammad abduh, ia menyebut nama-nam seperti M. Natsir, Syafaruddin Prawira negara, Muhammad Roem, Yusuf Wibisono dan Abu Hanifah. Dipihak lain pemimpin agama generasi tua yang bersifat konserpatif merupakan sayap kanannya berpangkalan kepada Nahdatul Ulama dan unsur-unsur Muhammadiyah yang lebih konserpatif. Sebagai golongan menengah ia menyebutkan Sukiman dan Prawoto Mangunkusumo ...sayap kiri dalam Masyumi sendiri (misalnya M. Natsir dan Abu Hanifah).<sup>32</sup>

Kedua golongan nasionalis yang netral agama merupakan hasil sistim pendidikan Belanda di Indonesia terutama pemikiran Snouch Hurgronje untuk memajukan (emansipasi) orang-orang Indonesia dari Islam, walaupun banyak pula dari kalangan mereka yang berpendidikan Barat yang tidak memenuhi harapan Snouch Hurgronje untuk berasosiasi dengan negeri Belanda. Para intelektual ini bergabung dengan para nasionalis yang ingin melenyapkan Belanda di Indonesia, walaupun mereka merupakan produk Barat, ini bukan saja Karena latar belakang pendidikan mereka, melainkan juga karena pikiran-pikiran politik mereka yang bersifat sekuler tanpa penyertaan dan penghayatan ajaran agama.<sup>33</sup>

Pergulatan idiologi yang membuka gagasan-gagasan tentang nasionalisme dan dasar negara, posisi umat Islam dalam negara terlihat dalam dua fase . Fase pertama, semenjak tahu 30-an setelah terbentuknya Prtai Nasionalis Indonesia pada 1927 oleh sukarno,

<sup>32</sup>BJ.Boland , Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, dari Buku, Struggle of Islam in Modern Indonesia , pen. Graffiti Press, cet I. h. 45

<sup>33</sup> Deliar Noer h. 339

Syahrir dan Muhammad Hatta bergabung untuk membentuk cikal bakal Gerakan Nasionalis Indonesia dengan paham kebangsaan (nasionalisme) sebagai kekuatan utamanya ... membangun panggung konfrontasi ideologis antara pemimpin dan aktivis Islam politik, terutama dalam hal soal hubungan antara agama (Islam) dan negara dalam sebuah negara Indonesia merdeka. Dalam konteks historis inilah dua kelompok yang saling bertentangan muncul dalam diskursus politik Indonesia satu golongan Islam dan (2) golongan nasionalis<sup>34</sup>

Pada fase pertama ini terlihat kontroversi ideologis ini berada sekitar ideologi tentang nasionalisme, apa dan bagaimana wujud (eksistensi) nasionalisme itu. Perumusan bentuk nasionalisme terlihat dalam pemikiran H. Agus Salim, yang dijawab Sukarna (PNI), Agus Salim menjelaskan;

Atas nama tanah air yang oleh beberapa bangsa disifatkan dengan Dewi atau ibu, bangsa Prancis dengan gembira menurunkan Lodewijk XIV penganiaya dan penghisap darah rakyat itu...

Atas nama tanah air Kerajaan Prusien merubuhkan Otentrijk dari pada derajat kemuliaannya itu.

Atas nama tanah air bangsa Prancis menurut Napoleon.

Atas nama tanah air Pemerintah Jerman sebelum perang besar, dan dalam masa perang itu menarik segala anak laki-laki yang sehat dan kuat dari pada ibu bapaknya untuk mengalahkan, menaklukkan

---

<sup>34</sup>Bakhtiar Effendy, h. 70

dunia ...bahkan atas nama tanah air masing-masing kita melihat bangsa Erofa bagi meninggikan derajat bangsa Erofa...

Demikian kita lihat betapa agama yang menghambakan manusia kepada berhala tanah air yaitu mendekati kepada persaingan, berebut kekayaan, kemegahan dan kebesaran kepada membusukkan, memperhinakan dan merusakkan tanah air orang lain dengan tidak mengingat hak dan keadilan<sup>35</sup>

Bentuk nasionalisme (persatuan) yang diinginkan Agus Salim tidak semata-mata nasionalisme itu sendiri sebagai eksistensinya, jika demikian manusia bias diperbudak dan menciptakan paradoksi dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan itu sendiri, karena fanatisme dan cinta yang berlebihan kepada ibu atau negeri itu sendiri, pada gilirannya dapat menganggap superioeitas nationnya dan merendahkan nation orang lain, selanjutnya Agussalim menjelaskan sebagaimana yang dikutip Bakhtiar Effendy dalam buku Islam dan Negara, pandangan itu memperbudak manusia menjadi penyembah tanah air ...pandangan itu akan dapat mencairkan keyakinan tauhid seseorang dan mengurangi bakti seseorang kepada Tuhan. Karena alasan itu Agussalim dengan tegas menyatakan bahwa nasionalisme harus diletakkan dalam kerangka pengabdian kita kepada Allah. Dan sejalan dengan itu menurutnya maka prinsip yang harus dinomorsatukan

---

<sup>35</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, cet IV, Panitia penerbit, dibawah Bendera Revolusi 1969 h. 110-111

adalah Islam. Ahmad Hasan (Persis) mengkritik nasionalisme sebagai sesuatu yang berwatak chauvinistik (ashabiyyah).<sup>36</sup>

Selanjutnya Soekarno lebih menjelaskan lagi dengan menjawab tulisan Agus Salim dengan mengemukakan watak nasionalisme menurut beliau tidak agresif dan berwatak ketimuran bukan nasionalisme kebaratan, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasny Tuhan dan membuat kita menjadi hidup dalam roh<sup>37</sup>

Fase kedua pada awal 40-an polemic diatas berkembang jauh melampaui masalah-masalah nasionalisme. Polemik-polemik itu menyintuh masalah yang lebih penting yakni; Hubungan politik antara Islam dan negara. Dalam priode ini tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada tokoh yang begitu sering terlibat dalam berbagai perdebatan kecuali Soekarno dan Natsir.<sup>38</sup>

Pemikiran Soekarno yang kental dengan sifat sekuler, tidak saja bersumber dari pemikiran Barat yang memisahkan urusan agama dan politik yang maju dengan sains dan teknologi secara tegas terlihat dilandasi dengan sekularismedan merupakan alur sejarah yang bersifat linear, teori sejarah yang dikemukakan oleh August Comte dengan tiga fase perkembangan sejarah. Perkembangan pemikiran Islam kontempore, Ideologi politik Soekarno dipengaruhi pemikiran

---

<sup>36</sup>Bakhtiar Effendy, h. 71. lihat Deliar Noer, *The Modern Muslim Movement in Indonesia*. h. 253-257

<sup>37</sup> Soekarno, h. 112

<sup>38</sup> Bakhtiar Effendy, h. 75

Mustafa Kemal Atatürk, Amir Ali dari India dan Ali Adb al-Raziq dari Mesir.<sup>39</sup>

Sedang M. Nasir melihat sebaliknya bahwa uruan agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara merupakan media agama untuk dapat berjalannya hukum-hukum Tuhan, disebabkan hukum-hukum Tuhan itu tidak dapat berjalan sendirinya, melainkan negara menguasai hukum-hukum itu, Adapun pemikiran politik M. Natsir dinspirasi oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer seperti, Muhammad Abduh dari Mesi, meski ia sendiri berpendidikan Barat, tetapi banyak bergaul dengan tokoh-tokoh Islam, seperti Agussalim, Hasan Bandung dan tokoh-tokoh Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah di tanah air.

Polemik Soekarno dengan M. Natsir berkembang dalam fase kedua ini dan terlihat menjurus kepada sifat mutlak-mutlakan, terbelah dari politik kelompok nasionalis Soekarno, tidak ada kompromi antara kedua kelompok nasionalis itu, mengindikasikan bahwa betapa sulitnya meletakkan kerangka pikir yang dapat diterima semua pihak.

Polemik Soekarno dan M. Natsir masih bersifat eksploratif sejak awal keduanya tidak bermaksud untuk merumuskan konsep-konsep yang siap pakai mengenai hubungan antara agama dan

---

<sup>39</sup> Untuk melihat alur pemikiran politik Soekarno, ia banyak mendasarkan pemikirannya dari negeri-negeri muslim dan mengambil tokoh-tokoh idolanya yang cenderung sekuler, ia mampu mengadakan perbandingan secara netral dari tokoh-tokoh sebaliknya, pembahasan Soekarno dalam hal ini lihat, *Dibawah Bendera Revolusi*, Memudahkan pengertian Islam Op.Cit. 369-402, Khusus pandangan Soekarno tentang Turki Lihat, h. 403 dalam Buku yang sama, *Apa sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara* Lihat Bakhtiar Effendy h. 78-79

negara....keduanya hanya ingin menunjukkan posisi idiologi politis masing-masing,<sup>40</sup> yang muncul adalah kontroversi dibadan bentukan Jepang.Badan penyidik Usaha-Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu merupakan ajang kontroversi idiologis hingga tahun 1950-an. Dalam masa ini hingga penghujung tahun 1960, merupakan kondisi yang tidak stabil dari sudut politikdan ekonomi Indonesia, gejolak sosial menggoyangkan pemerintahan Soekarno atas beberapa sebab yang kontra produktif. Soekarno bertinggat diluar batas-batas demokrasi, berubahnya system pemerintahan ke demokrasi terpimpin, dibubarkannya partai Masyumidan pembontakan PKI(G. 40/S PKI) tahun 1965, menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soekarnoyang kelak kemudian munculnya kekuasaan Soeharto yang menamkan dirinya Orde Bar, dengan arah kebijakan modernisasi pembangunan dengan syarat stabilitas pemerintahan, melaksanakan Pncasila secara konsekwen dan lain-laindengan pola pembangunan yang nantinya membangkitkan satu kelompok intelektual yang berbasis santri dan mengenyam pendidikan Barat modern.

### C. *Masa Orde Baru; Faktor pembangunan dan Stabilitas*

Seiring dengan situasi yang berubah, ketika Orde Baru lahir pada penghujung 1960 mencuatlah harapan dari pelbagai kalangan dalam masyarakat akan kehidupan yang lebih beradap. Dengan ditumbangannya PKI dan Orde Lamanya, yang disertai dengan intrik pelbagai kelompok politik yang diwarnai kekerasan politik, muncullah

---

<sup>40</sup> Bakhtiar Effendy, h. 81



era baru yang menyimpan janji-janji bagi komunitas yang secara diametral berseberangan dengan PKI. Tidak heran ketika pemerintah Orde baru lahir, ada diantara umat Islam yang merasa optimis untuk menghidupkan kembali parta terlarang Masyumi, yang kemudian ternyata tidak mendapatkan tempat dari sebuah rezim yang justru semula mereka dukung.<sup>41</sup>

Aspirasi dan inspirasi umat Islam tidak mendapat sambutan dari pemerintahan Orde Baru, bahkan setelah Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) 1968, didirikan oleh tokoh-tokoh tua yang kuat di Masyumi tidak direstui untuk memimpin, serentetan restrukturisasi pemerintah Orde Baru, seperti usaha menyederhakan partai politik dari Sembilan partai menjadi tiga partai; Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai peleburan dari Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, PSII. Dan Partai Demokrat Indonesia (PDI), sebagai peleburan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Khatolik. Rencana undang-undang kepartaian dan Golkar ini diajukan ke Parlemen pada Desember 1974 dan pada 14 Agustus 1975 disahkan sebagai undang-undang no 3/1975, dua tahun kemudian tepatnya pada 1977, pemerintah mengajukan perlunya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian diterima melalui ketetapan GBHN pada tahun 1978. Puncak restrukturisasi yang juga sering diartikan sebagai proses depolitisasi Islam itu terlihat pada usaha pemerintah untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ditetapkan melalui UU

---

<sup>41</sup>Dedy Djamaluddin Malik, Idi Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik, pen. Zaman Wacana Mulia, cet. I. Januari, 1988. h. 32

No.3/1985 dan sesuai dengan ketetapan UU No. 8/1985 semua organisasi sosial berasaskan Pancasila<sup>42</sup>

Dengan adanya restrukturisasi kepartaian dan ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal untuk semua partai politik setelah diadakan fusi dan untuk semua organisasi sosial, menyebabkan partai politik dan organisasi sosial itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan secara praktis merubah sasaran politiknya yang tidak sekedar ideologis, tetapi lebih mengarah kepada kebutuhan praktis. Sementara bagi kalangan yang mengamati perkembangan politik di tanah air, mensinyalir berakhirnya era partai-partai Islam Indonesia. Disamping hilangnya perdebatan ideologis yang melelahkan tanpa ujung itu, menimbulkan wacana yang lebih teduh dan berkebudayaan. Perkembangan politik dan wacana pemikiran mereduksike arah yang dirancang Orde Baru, dengan menekankan upaya modernisasi dengan format Barat. Orde baru berusaha meyakinkan rakyat dan para pendukungnya bahwa masa depan Indonesia haruslah bebas dari pada politik yang didasarkan pada ideologi. Orde baru mengajukan argument tentang perlunya pembentukan suatu masyarakat yang bebas konflik ideologis dan memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar, argumen ini mendapat sambutan hangat dikalangan intelektual... yang memberikan aspirasi terhadap implementasi nilai-nilai modernitas yang sekuler di Indonesia seperti; Pragmatisme, rasionalisme dan internasionalisme. Mereka ini kalaulah tidak semua banyak

---

<sup>42</sup> Idi Jamaluddin Malik Dkk. h. 3

diantaranya yang mempunyai afinitas idiologis kepada Partai Sosialis Indonesia (PSI), walaupun dibubarkan Soekarno pada tahun 1960, pengaruh kelompok yang apresiatif terhadap nilai-nilai modernitas yang sekuler itu cukup luas, khususnya dikalangan intelektual dan kelompok mahasiswa tertentu di Jakarta dan Bandung tahun 1960 itu.<sup>43</sup>

Serentetan usaha pemerintah yang melakukan restrukturisasi partai-partai politik, depolitisasi, politik masa mengambang dan sebagai mana seringkali dianggap sebagai variable yang sangat menentukan dalam menganalisa kemunduran Politik Islam dan Islam Politik. Pandangan seperti ini ada benarnya, terutama jika dikaitkan dengan strategi politik Orde Baru pada tahun 1970-an.<sup>44</sup> Namun pakta politik yang diterapkan Orde Baru untuk memperlemah kekuatan Islam politik meski berhasil, tetapi terjadi sifat yang metamorphosis. Ditahun 1980, atas dasar pengalaman sejarah dimana politik umat islam selalu mengalami kegagalan. Dari pengalaman sejarah itu umat Islam melakukan kajian (redefinisi) dan formulasi terhadap politik dalam melihat posisinya dalam berhadapan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Sejak semula Orde baru telah melakukan organisasi dalam pemerintahan terhadap pembangunan dan stabilitas, mengangkat kehidupan ekonomi dan sosial. Beberapa elemen masyarakat menjadi tersejahterakan yang memunculkan kelas menengah profesional baru

---

<sup>43</sup> M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia*, sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, pen. Paramadina, cet. I. 1995. h. 20

<sup>44</sup> Syafii anwar. h. 111

dari berbagai lapisan sosial, yang menarik dari kelas lapisan sosial baru ini adalah munculnya anak-anak dari kaum santri ketengah sejarah, membawa idiologi mereka sendiri. Ada kemungkinan bahwa mereka dapat menjadi basis sosial bagi perubahan-perubahan yang bakal terjadi, jumlah mereka akan semakin besar, mengingat bahwa sub kultur ini mengalami perubahan populasi berkat perluasan pendidikan umum disatu sisi dan pendidikan agama pada sisi lain. Pendidikan umum memperluas kesempatan bagi santri-santri lama, sedang pendidikan agama menarik anggota baru kedalam sub kultur ini... Mobilitas sosial yang terjadi sejak diberlakukannya wajib belajar telah membawa naik masyarakat bawah dari pedesaan menuju kesegala arah. Anak-anak desa yang mempunyai budaya egalitarian sekarang berada dibanyak tempat, diantaranya didalam dunia akademis, mereka sekarang menjadi teknokratbaru, juga banyak yang terdiri atas sub kultur santri lama dan baru.<sup>45</sup>

Perkembangan dunia pendidikan yang diilhami odernisasi dan kondisi sosial-ekonomi yang relative stabil menumbuhkan aktor-aktor yang nantinya memasuki bursa lapangan kerja baik dalam birokrasi, sosial-ekonomi dan khususnya akademisi dan intelektual. Mereka ini banyak memiliki keterkaitan budaya kemasa lalu yang banyak menyerap idiologi dan semangat para pendahulunya, meskipun pada dirinya telah terintegrasi pendidikan agama dan sekuler modern. Gelombang baru dari kelas menengah dari sub kultur santri, tentu tidak termasuk dalam apa yang disebut Weber sebagai perilaku rasional

---

<sup>45</sup>Kuntowijoyo, Paradigma Islam ; Interpretasi untuk Aksi. Pn. Mizan, bandung 1991. Cet. I. h. 373

murni, tetapi mereka lebih cenderung kepada rasional nilai. Mereka juga mewarisi sebuah tradisi besar yang berakar kemasa lalu . Perbedaannya ialah mereka adalah anak-anak zamannya yang sudah sepenuhnya mengalami integrasi politik secara nasional.<sup>46</sup> Pemikiran mereka tampak lebih utuh, berakar pada karakter Islam (ideal) tetapi bernuansa ke Indonesiaan yang mampu melihat pluralitas sosial, agama dan budaya. Meski tidak menghilangkan sifat idiologi Islam, tetapi lebih mengedepankan kondisi paktual yang nyata. Mereka terlihat lebih mampu menangkap api Islam, jiwa islam, seperti yang telah dilontarkan Soekarno tahu 30-an.

---

<sup>46</sup> Kuntowijoyo, h. 374

### BAB III

## BIOGRAFI M. NATSIR DAN PEMIKIRAN POLITIK

### A. Biografi M. Natsir

M. Natsir lahir di Alahan Panjang Sumatera Barat 17 Juli 1908, bergelar Datuk Sinaro Panjang. Ketika berusia 8 tahun M. Natsir belajar pada HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) Adabiyah di Padang dan tinggal bersama makciknya. Kemudian ia dipindahkan oleh orang tuanya ke HIS pemerintah di Solok dan tinggal di rumah Haji Musa, seorang saudagar. Di sini ia banyak menerima ilmu, pada malam hari ia mengaji Alquran, pagi hari belajar pada HIS dan sore hari belajar di Madrasah Diniyah. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke HIS Padang dan tinggal bersamakakaknya Rabiah. Pada tahun 1923 ia meneruskan pendidikan ke MULO (*Meer Uitgebreit Lager Onderwijs*) setingkat SMP di Padang, di sini menjadi anggota JIB (*Jong Islamic Bond*) cabang Padang. Tahun 1927 ia melanjutkan ke AMS (*Al Gemene Middelbare School*) setingkat SMA di Bandung.

Di MULO dan AMS ia mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Selama di AMS ia tertarik untuk menekuni ilmu pengetahuan agama, waktu luangnya digunakan untuk belajar agama pada Persatuan Islam (PERSIS) yang kemudian ia menjadi ketuanya. Ia lulus dari AMS pada tahun 1930 nilai prestasi yang diperolehnya memungkinkannya untuk mendapatkan beasiswa di Perguruan Tinggi.

Sejak di MULO dan AMS ia sudah mulai mengenal semangat perjuangan, ia menjadi anggota kepanduan pada JIB. Ketika di AMS ia menjadi anggota JIB cabang Bandung, kemudian menjadi ketuanya tahun 1928-1932, dan berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti: H. Agus Salim, Wihono Purbohadidjono, dan Syamsulrijal. Begitu juga A. Hassan dan Ahmad Soerkati tetapi yang paling berpengaruh adalah H. Agus Salim, A. Hassan dan Ahmad Soekarti. M. Natsir pernah aktif Partai Islam Indonesia (PII) dan sempat pula mendirikan Pendidikan Islam (PENDIS) di Bandung, sebuah bentuk pendidikan Islam modern yang bernafaskan agama. Kemudian menjadi direktornya selama 10 tahun sejak 1932. tahun 1940-1942 menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung.

Tahun 1945-1946 M. Natsir menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan tiga periode pada era kabinet Syahrir dan Hatta (1946-1949), menjadi Ketua DPP Masyumi (1949-1958). Pada saat Indonesia menjadi negara serikat (RIS) sebagai keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB), M. Natsir menolak tawaran Bung Hatta menjadi Perdana Menteri Negara Bagian RIS di Yogyakarta. Namun ia tetap melakukan lobby selama dua setengah bulan dengan menghubungi negara-negara bagian RIS lainnya, agar membubarkan diri dan bersatu kembali dengan negara kesatuan RI di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Usaha M. Natsir tidak sia-sia, dalam Sidang Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat) 3 April 1950. Natsir melontarkan mosi yang memungkinkan RI bersatu kembali, setelah terpecah belah menjadi 17 negara bagian, mosi ini dikenal dengan "mosi integral Natsir". Atas jasanya itu Bung Karno mengangkat M. Natsir sebagai Perdana Menteri dan ia merupakan Perdana Menteri pertama RI, pada saat itu Natsir berusia 42 tahun.

Ketika memerintah, ia berhadapan dengan banyak persoalan antara lain masalah persenjataan yang ada di tangan para sukarelawan dari berbagai ideology pasca perjuangan fisik. Mereka adalah Darul Islam, PKI dan gerombolan MMC (Merapi Merbabu Kompleks), Laskar Harimau Liar, juga masalah otonomi Aceh dan PNI yang tidak bersahabat. PNI tampak sakit hati disebabkan tidak dimasukkan dalam Kabinet Natsir, ditambah lagi dengan silang pendapat dengan Soekarno tentang masalah Irian Barat, dimana Soekarno berpendapat untuk mengambil paksa dari Belanda, tetapi menurut M. Natsir yang konsisten dengan KMB (Konferensi Meja Bundar), tampaknya bagi Soekarno hal itu merupakan penokakan kepada pendapatnya. Silang pendapat Soekarno dengan M. Natsir memang telah sejak lama, yang berawal dari berbagai pidato dan tulisan Bung Karno yang mengejek Umat Islam.

Ketika Soekarno ingin mendekatkan berbagai ideologi yang secara factual menjadi kekuatan politik seperti PKI, Islam dan Nasionalis. Natsir menjaga jarak dengan Soekarno sambil memimpin Masyumi di Parlemen (1950-1958).



Pada tanggal 17 Agustus 1959 Bung Karno secara sepihak membubarkan Partai Masyumi, tetapi dimaklumkan pengampunan bagi Natsir dan kawan-kawannya. Natsir terkecoh, setibanya di Jakarta beserta Syarifuddin dan kawan-kawan, mereka ditangkap atas tuduhan terlibat pemberontakan Rakyat Republik Indonesia (PRRI), Permesta. Natsir diasingkan dengan menjalani "karantina politik" di Batu Malang, Jawa Timur (1960-1962) dan menjadi "tahanan politik" di rumah tahanan militer (RTM) Keagungan, Jakarta (1962-1966).

Sejak penahanan Natsir, kiprah politiknya secara praktis hilang tetapi tidak berarti kehilangan semangatnya, hal ini terbukti sebelum M. Natsir dibebaskan sejumlah tokoh mencoba menghidupkan kembali Masyumi di awal munculnya pemerintahan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru kiprah politiknya pun tidak mulus karena menghadapi tantangan dari pemerintah, selain itu dukungan dari pemerintah untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Kenyataan itu tidak menyurutkannya, pada tahun 1967 M. Natsir bersama-sama ulama mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta, jalur dakwah ini tidak semata-mata meninggalkan perhatiannya terhadap politik.

Natsir tetap tegar dan konsekuen melaksanakan gerakan dakwah. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah ia kemukakan. Kalau dulu kita berdakwah lewat politik, tetapi sekarang kita berpolitik lewat dakwah. Ketegaran M. Natsir dalam menyampaikan dakwah terlihat

multialternatif, bahwa dakwah dapat saja dilaksanakan dari semua profesi dan keterlibatan sosial dalam kehidupan.

Selain itu, M. Natsir bersama Jenderal A. H. Nasution yang pernah menangkapnya dengan rekannya yang lain, M. Natsir ikut menandatangani apa yang dikenal dengan Petisi 50, pada 5 Mei 1980. Sejak itu Natsir tidak diizinkan pergi keluar negeri meskipun itu teramat penting bagi dirinya, bangsa dan umat Islam di tanah air, hingga akhir hayatnya wafat tanggal 7 Februari 1993.

#### *Penghargaan*

- Memimpin Sidang Mukhtar Alam Islami di Damaskus bersama Syekh Maulana Abu A'la al-Maududi (Lahore) dan Abu Hasan an-Nadwi (Lucknom), tahun 1957.
- Wakil Presiden Mukhtar Alam Islami yang bermarkas di Karachi Pakistan, tahun 1967.
- Anggota Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.
- Anggota Majelis A'la al-Islami li al-Masajid, Makkah, tahun 1972.
- Anugerah "Faisal Award" dari King Faisal, Saudi Arabia.

#### *Beberapa Karya*

##### a. Bidang Agama

- Agama dan Moral, 1972.
- Bila Doa Tak Berjawab Lagi, 1973.
- Khotbah Hari Raya, 1951.
- Di bawah Naungan Risalah, 1974.
- Fiqhud Dakwah: Jejak Risalah dan Dasar-Dasar Dakwah, 1971.

- Gubahlah Dunia dengan Amalmu, Zinari Zaman dengan Imanmu, 1970.
  - Iman Sumber Kekuatan Lahir dan Batin, 1975.
  - Keragaman Hidup Antar Agama, 1969.
  - Pembina Pribadi dan Ummat, 1972.
  - dll.
- b. Bidang Politik
- Capita Selektta, 1973.
  - Dapatkah Dipisahkan Politik dari Agama?, 1953.
  - Dakwah dan Pembangunan, 1973.
  - Dengan Islam ke Indonesia Merdeka
  - Hidupkan Kembali Idealisme dan Semangat Pengorbanan, 1970.
  - Ilmu Kekuasaan dan Harta Amanat Allah, 1967.
  - Islam sebagai Dasar Negara, 1957.
  - Islam sebagai Ideologi, t.t.
  - Masalah Palestina, 1971.
  - Persatuan Agama dan Negara, 1969.
  - Mempersatukan Umat, 1968.
  - Revolusi Islam: Jihad, 1955.
- c. Bidang Sosial Budaya
- Berbahagialah Perintis .... , 1971.
  - Bibliophilisme Inden Islam, 1941.
  - Islam dan Akal Merdeka, 1970.
  - Islam dan Kristen di Indonesia, 1969.
  - Kebudayaan Islam, 1984.
  - Kultur Islam & Pendidikan Islam, 1936.

- Muhammadiyah Pelopor Pembaharuan Pemikiran Islam, 1974.
- Susunan Masyarakat Islam, 1950.
- Tebarkan Benih Itu dalam Keadaan Bagaimanapun Juga, 1969.
- Tinjauan Hidup, 1957.
- Uluran Tangan yang Tak Terjawab, 1974.

#### *B. Konstruksi Pemikiran Politik*

##### **Nasionalisme Islami**

Kehadiran M. Natsir dalam pentas politik Indonesia, sejalan dengan perkembangan politik di tanah air yang sedang mencari identitas atau watak kesatuan Indonesia, meski telah terlampaui suatu fase sejarah tentang sifat kesatuan Indonesia. Dimana telah tergambar bentuk negara Indonesia baru yakni: "nasionalisme." Dalam hal ini, terlihat tidak adanya penerimaan yang sama bagi semua pemimpin nasional dari pemikiran dan kelompok-kelompok politik, tetapi peran yang dimainkan M. Natsir di tahun 4-an tidak sekedar polemik tentang nasionalisme yang bagi M. Natsir merupakan alat untuk mencapai cita-cita Islam. Karena itu polemik tentang politik Indonesia (di masa Natsir) telah melampaui perdebatan mengenai watak negara kesatuan itu, kepada bagaimana hubungan nasionalisme dengan Islam (Islam dan politik) dibentuk.

Bagi kelompok nasionalis jelas bahwa mereka netral agama, negara tidak mencampuri urusan-urusan agama, hal ini diserahkan kepada rakyat tetapi bagi Natsir sebagai wakil kelompok Islam, memandang Islam memiliki keterkaitan dengan negara. Sebagaimana argumentasi Natsir: Jikalau membicarakan urusan agama dan

negara ialah, bahwa pengertian Islam yang dinamakan *agama* itu, bukanlah semata-mata yang disebut *peribadatan*. Istilah sehari-hari itu seperti: shalat dan puasa, akan tetapi yang dinamakan *agama* menurut pengertian Islam, meliputi semua kaidah-kaidah, hudud-hudud (batas-batas) dalam muamalah (pergaulan) dalam masyarakat, menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam itu.<sup>47</sup>

Agama (Islam) tidak sekedar kepercayaan yang memiliki kaitan antara Tuhan dan manusia saja, yang tergambar dalam bentuk ibadat. Pandangan ini begitu sempit, bila dipakaikan kepada Islam, karena Islam tidak sekedar agama, sebagaimana pemahaman Barat. Tetapi Islam meliputi semua aspek yaitu Islam bersifat holistik, semua aturan-aturan itu dalam garis besarnya sudah terhimpun dalam Alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>48</sup> Watak holistik Islam yang demikian memberikan pandangan, bahwa politik atau negara berada dalam kerangka keislaman yang dapat diterjemahkan kepada kepentingan-kepentingan politik itu sendiri. Ideologi politik Natsir yang memandang Islam sebagai agama yang di dalamnya meliputi kegiatan-kegiatan sosial (muamalat), tercermin dari pemikiran-pemikiran ilmuan politik kontemporer seperti: Al Maududi, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al Banna, dan Muhammad Qutb.

---

<sup>47</sup>M. Natsir. *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) Cet. III, h. 436-437.

<sup>48</sup>M. Natsir. *Loc. Cit.*,

Pemikiran-pemikiran politik itu sangat berpengaruh dalam aksi politik M. Natsir. Lebih mendalam lagi Natsir mengangkat Hadis Nabi, yang diriwayatkan Ibnu Katsir, sebagaimana ditulis dalam Kapita Selektta.

“Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Qur’an itu.”

Ideologi politik Natsir selalu diletakan pada wahyu, yang melihat penguasaan yang hakiki adalah Tuhan. Yang meletakkan kekuasaan-Nya di tangan penguasa, sehingga terpelihara risalah-Nya. Natsir sendiri mengatakan, untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak harus ada suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara.<sup>49</sup> Maksud Natsir terlihat bahwa kepentingan dihubungkannya Islam dengan Negara secara ketat adalah tegaknya syariat Islam it dalam pergaulan sosial. Sehingga segala aktivitas politik sosial, ekonomi terselenggara dengan nafas dan ruh Islam, perjuangan dan pengorbanan setiap warga negara didasari dengan keikhlasan dan ketulusan.

---

<sup>49</sup>M. Natsir, *Loc. Cit.*, pemikiran bahwa Imam (Khalifah) diangkat adaiah untuk tegaknya agama dan terpeliharanya tatanan sosial (dunia), dikemukakan al-Mawardi (370-450 H). Lihat; Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, pen. Darul Falah, pent. Fadhi Bahri dalma edisi Indonesia, cet. I, 2000 M, h. 1. selanjutnya lihat Ahmad Syafii Ma’arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, pen. LP3ES, Jakarta, cet. III, h. 26, begitupun Ibnu Taimiyah (1263-1328), h. 33.

Natsir terlihat menghendaki negara berlandaskan agama secara formal, agama memiliki posisi yang nyata (*theistik democracy*) sebagaimana Natsir pernah mengusulkan "Nasionalisme Islam." Adapun posisi Islam dalam Nasionalisme yang diinginkannya, ia mengatakan:

Seringkali orang bertanya: "Bagaimana caranya tuan hendak mengatur negara dengan Islam? Apakah Qur'an cukup untuk mengatur negara modern seperti negara dalam abad 20 ini, yang bukan sedikit seluk-beluknya. Memang kalau kita buka Qur'an, kita tidak akan bertemu di dalamnya petunjuk-petunjuk untuk merencanakan Anggaran Belanja Negara. Tidak bersua di dalamnya peraturan valuta dan aturan devisa dan lain-lain yang semacam itu. Tidak! Ini semua sudah tentu tidak ada dan memang tidak perlu diatur dengan wahyu Ilahi yang bersifat kekal. Sebab semua ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan, yang selalu bertukar dan beredar menurut tempat, zaman dan keadaan. Yang diatur oleh Islam ialah dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat yang tidak berubah kepentingan dan keperluannya yaitu prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat, selama manusia masih bersifat manusia.

Selanjutnya yang berhubungan dengan kepala negara, sifat dan nama kepala negara. Islam menetapkan, bahwa untuk keselamatan masyarakat manusia ada beberapa sifat yang perlu pada seseorang yang akan dipilih menjadi ketua, atau kepala negara. Dan diperingatkan pula orang-orang yang macama

manakah, yang kepadanya tidak boleh diserahkan kekuasaan dan urusan. Apakah bunyinya gelar atau titel yang diberikan kepada kepala negara itu, sebagaimana telah dikatakan, tidak menjadi syarat yang terpenting. Khalifah boleh, Amiril Mukminin boleh, -presiden boleh, apa saja boleh, asal sifat-sifat, hak dan kewajiban adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Kemudian kriteria untuk diangkatnya seseorang menjadi kepala negara serta penurunan kepala negara, bentuk pemerintahan dan hukum-hukum. Ditetapkan bahwa yang akan jadi kriteirum atau ukuran untuk melantik seseorang menjadi kepala itu, adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, jadi bukanlah bangsa dan keturunannya atau pun semata-mata intelektualnya saja.

Ditetapkan bahwa kepala negara itu wajib bermusyawarah dalam urusan yang mengenai umat, yakni dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan lebih dulu. Tetapi bukan dalam hal-hal hukum-hukum yang telah ada ketentuannya dalam agama. Apakah permusyawaratan itu dilakukan sebagaimana Saidina Abu Bakar bermusyawarah dengan Amir Aminnya di padang pasir dan di bawah poko korma, ataukah diatur dengan parlementer-stelsel seperti di abad ke-20 ini. Ataukah akan dipakai *individueel-kiesrecht* ataukah *organich-kiesrecht* tidak ditetapkan oleh agama Islam. Hal ini diserahkan dengan leluasa kepada ijtihad kita sendiri.



Ditetapkan beberapa hak dan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah yaitu: kewajiban, tanggung jawab, dan cara-cara yang mesti dikerjakan bagi pihak yang berkuasa dan kewajiban mengikuti bagi yang diperintah, disamping hak mengoreksi dan kalau perlu hak menyingkari kekuasaan bagi yang salah dan melanggar hak-hak menurut ajaran Islam.<sup>50</sup>

Pemikiran politik Natsir yang sarat dengan landasan keislaman cenderung menafsirkan doktrin sosial-politik Islam secara elastis dan fleksibel. Kecenderungan ini dalam kajian politik Islam kontemporer sering dikategorikan sebagai ke arah "modernisme,"<sup>51</sup> dan fundamentalisme."<sup>52</sup> Namun demikian ideologi politik Natsir dalam mentransformasikan Islam ke dalam politik, lebih tetap dikatakan sebagai sosok "modernisme politik" ketimbang fundamental. Hal ini berbeda dari al Maududi yang menafsirkan Islam secara rigit dan cenderung literalis, tidak elastis, karena itu Maududi lebih bersifat fundamentalis dalam politik. Meski antara Natsir dan Maududi lebih bertitik tolak dari pandangan bahwa Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna. Kekhasan ideologi politik Natsir terlihat dari

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, j. 447-448.

<sup>51</sup>Ma'mun Murod Al-Brebey, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), Cet. I, h. 142.

<sup>52</sup>Yusril Ihza Mahendra, dalam Topik: Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi, Telaah tentang Dinamika Islam dan Transformasinya kedalam Ideologi Politik. Lihat, Anwar Harjono dkk. *Pemikiran, Perjuangan Muhammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet. I, h. 65.

penafsirannya tentang "Islam sebagai agama yang lengkap"<sup>53</sup> kesempurnaan ajaran Islam itu ... justru karena ia hanya memberikan panduan-panduan yang bersifat umum, dan tidak dalam bentuk perincian-perinciannya. Ia tidak menafsirkan bahwa ijthihad itu telah dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam dari zaman ke zaman yang lampau dan semuanya itu khazanah warisan tradisi Islam. Namun ijthihad mereka adalah respon mereka kepada suatu zaman tertentu.

Untuk itu ijthihad diperlukan dari zaman ke zaman dalam hal mentransformasikan Islam sesuai dengan konteksnya meskipun menggunakan bahan-bahan pemikiran lain seperti kecerdasan Barat modern yang dianggapnya sebagai "hikmah" tentunya dengan hal-hal yang berkenaan di luar batasan-batasan Islam itu sendiri. Dengan sendirinya persoalan-persoalan yang berkembang di dunia modern yang belum terdapat pengaturannya dalam Alquran-Hadis, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber pokok ajaran Islam itu, khususnya dalam politik dapat saja dipergunakan meskipun bukan produk dari Islam dan sejarahnya. Pandangan ini membuat Natsir leluasa untuk menggunakan sumber-sumber pikiran Barat modern yang memang memiliki latar belakang dalam pendidikannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Islam is Indeed Much Than a System of Theology is a Complete Civilization*, Prof. HAR. Gibb. Lihat; M. Hasheem, *Kekayaan Dunia Terhadap Islam*, cet. II. (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 190

<sup>54</sup>*Loc. Cit*

### C. *Karakteristik Idiologi Politik*

#### Visi Nasionalisme dan Demokrasi M. Natsir

M. Natsir seorang nasionalis dan menganut faham kebangsaan, sebagaimana ia katakan

“Seringkali orang menyangka, bahwa Islam bertentangan dengan adanya bangsa-bangsa. Tegasnya, katanya Islam memungkiri adanya bangsa, seolah-olah orang yang memeluk Islam itu tidak ada bangsanya lagi, yang demikian adalah tidak betul!. Kita dapat jadi seorang muslim yang taat dan pada saat yang sama dengan riang gembira pula menyanyikan ‘Indonesia Tanah Airku’ ... tidak ada perlunya seorang muslim harus menanggalkan kebangsaan dan kebudayaannya.” Dalam ajaran Islam disebutkan, bahwa manusia itu dijadikan dalam golongan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Bahasapun bermacam-macam ini adalah fitrah atau ‘natur’, kata orang sekarang. Dikatakan di ujung ayat itu, *‘lia ‘aro fu’* supaya kamu kenal mengenal satu dengan yang lain. (Q.S. Al-Hujarat : 13).<sup>55</sup>

Nasionalisme Natsir tidak mengenal pemisahan dengan Islam, faham kebangsaan ini menuntut keseimbangan antara kepentingan ideal Islam dengan kenyataan rill, bagaimana ajaran Islam meresap kepada kehidupan nyata. Dari sini diharapkan setiap warga negara yang cinta tanah air dapat menyadari diri di dalam

---

<sup>55</sup>Ahmad Muflih Saefuddin dalam, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, pen. Pustaka Firdaus, cet. I, 1996, h. 129-130. Lihat, Bahtiar Effendy, *Islam dan Politik ...*

kebangsaannya, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengabdian kepada Allah, sehingga paham kebangsaan bukan sebagai tujuan yang kemudian dapat saja berwatak sempit dan agresif karena orang dapat saja beranggapan kepentingan kebangsaan itu segala-galanya lebih jauh merasa super dan merasa berhak kepada yang lemah sekalipun menginjak hak-hak azasinya, tetapi nasionalisme adalah sarana untuk mewujudkan tujuan Islam (rahmatan lil 'alamin). Dalam hal ini "cinta tanah air" atau rasa "kebangsaan" tidak menjadi sempit (*chauvenistik* = Ashabiyah).

Umat Islam dapat saja berbangsa Indonesia sekaligus sebagai Islam, karena Islam tidak menafikan kenyataan adanya bangsa, suku, budaya, namun harus dipandang sejalan. Bangsa, suku, bahasa dan budaya menjadi sarana keislaman, perkakasnya Tuhan.

Adapun demokrasi secara historis telah dibicarakan dalam Majelis Konstituante dan Natsir terlibat di dalamnya. Semangat demokrasi tidak pernah mati dalam kalbu umat Islam Indonesia secara keseluruhan, semua pembicaraan dari wakil-wakil Islam dalam Majelis Konstituante dengan sadar telah memilih demokrasi sesuatu yang dapat dipakai bagi cita-cita politik Islam.<sup>56</sup>

Sehubungan dengan perdebatan-perdebatan dalam Majelis Konstituante yang saling menajam, bahkan cenderung memutlakakan seakan tidak terdapat jembatan antara pendukung

---

<sup>56</sup>Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), cet. III, h. 164.

kelompok Islam dan Pancasila dalam konteks demokrasi. Kelompok Islam mengusulkan demokrasi Islam, agar Islam dijadikan ideologi negara, berdasarkan argumen-argumen sebagai berikut: (1) watak holistik Islam (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.<sup>57</sup> Demokrasi yang dimaksudkan adalah yang berwatak Islam, bukan demokrasi yang berwatak sekuler. Dalam hal ini M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin, Isa Anshari, K.H. Majskur mengemukakan ideologi politik dalam memandang demokrasi berlandaskan prinsip-prinsip Ilahiyah. Adapun Pancasila dalam pandangan tokoh-tokoh Islam tidak dapat menyahuti rasa keagamaan umat Islam yang mayoritas di negeri ini, berbagai argumentasi dan kritik terhadap Pancasila muncul dari tokoh-tokoh Masyumi.

Natsir mengatakan: kewajiban saya dan kawan-kawan dari Fraksi Masyumi adalah untuk menyampaikan ke hadapan sidang pleno yang terhormat, pendirian kami dengan cara lebih luas dan mendalam dari apa yang sudah kami sampaikan dalam komisi sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan (PKK) yakni kehendak kami ... supaya negara Republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam.<sup>58</sup> Negara demokrasi berdasarkan Islam. Selanjutnya Natsir menjelaskan:

---

<sup>57</sup>Bakhtiar Efendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 107.

<sup>58</sup>Pidato Muhammad Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957. lihat Moh. Natsir "Islam sebagai Dasar Negara", Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957, h. 8

Di Indonesia paham hidup yang menggerakkan jiwa rakyatnya adalah agama. Dengan sendirinya asas negara kita harus berdasarkan agama, bukan suatu rangkaian berupa ide yang dianggap diterima oleh umum sebagai Pancasila yang tidak dipercayai sebagai agama. Kalaupun ada di dalamnya terumus Sila "Ketuhanan, sumbernya adalah sekuler, la-diniyyah, tanpa agama."<sup>59</sup>

Sekularisme (la-diniyah = tanpa agama) mengandung arti: Paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupan kaum sekuler tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan, ia tidak mengenal akhirat, Tuhan dan sebagainya. Walaupun adakalanya mereka mengakui akan adanya Tuhan tapi hanya dalam penghidupan perseorangan

M. Natsir terlihat menganggap bahwa secara ideologi sekularisme menyimpan ateisme. Atau Tuhan mereduksi kepada materi, menafikan wahyu dan menganggap etika dan moral merupakan produk dinamika sosial yang relatif. Tidak memiliki petunjuk-petunjuk yang tegas, nilai-nilai dan norma-norma, dapat menimbulkan kebingungan. Sekularisme-la-diniyah, dapat menurunkan nilai-nilai hidup manusia dari taraf ketuhanan kepada taraf kemasyarakatan semata, bahkan Tuhan diturunkan dari yang mutlak, sakral menjadi relatif-kondisional sesuai dengan asumsi manusia itu sendiri. Osman Ralibi sendiri mengemukakan pandangan tentang Pancasila Sukarno seperti yang dikutip Ahmad

---

<sup>59</sup>Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante, (tt), Jilid. III, h. 44

Syafii Maarif: Tuhan dalam Pancasila ialah Tuhan yang mati, yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa pada keempat sila lainnya, ia tidak memberikan hukum sama sekali. Malah jika Pancasila itu diperas, Tuhan itu sendiri yang kena hukum dan ia hilang lenyap ditelan oleh gotong-royong, sebagai Eka Sila, yaitu perasan dari Pancasila.<sup>60</sup>

Sedang Natsir sendiri, pada waktu berbicara tentang kelebihan Islam mengemukakan dua premis pokok, Pertama, agama (Islam) memberikan kemungkinan lebih banyak kepada pemeluknya untuk mencari ilmu dan kebenaran, filsafat sekuler hanya mengakui tiga dasar berpikir, empirisme, rasionalisme, dan intuisiisme, sedangkan wahyu tidak diakuinya. Di sini jelas sekali tampak kelebihan agama, sebab di samping mengakui tiga dasar berpikir di atas, agama itu sendiri berasal dari wahyu. Kedua, jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan. Contoh tentang ini, seseorang beriman ia akan mendapatkan keterangan tentang penderitaannya itu dalam ajaran agamanya, dimana agama memberikan suatu pegangan yang kukuh kepada manusia. Dalam kasus ini sekularisme berbeda sekali. Natsir menyebut tentang filsafat Karl Marx atau Darwin yang tidak memberikan tempat bila manusia mengalami pergolakan jiwa, semuanya ini hanyalah dianggap sebagai proses alamiah biasa. Bagi filsafat sekuler, menurut Natsir yang terpenting adalah posisi manusia sebagai kelompok, sementara kehidupan batin manusia berada di luar

---

<sup>60</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Op.cit.*, h. 163

pertimbangan. Argumen ini dikemukakan Natsir adalah dalamkaitannya dengan penolakannya terhadap Pancasila adalah netral dan sekuler dan tidak punya substansi apa-apa.<sup>61</sup>

Demokrasi dan Pancasila sebagai landasan tidak semata-mata salah, tetapi jika Islam dan demokrasi Islam sebagai yang terbaik tidakkah itu lebih kualifaid, ideologi Islam dan demokrasi yang kuat adalah solusi terbaik untuk persoalan manusia, bukankah demokrasi itu akan lebih menyahuti problema-problema kita. Secara lebih menukik landasan demokrasi yang diinginkan Natsir adalah tauhid, yang dapat memandirikan warganya. Dalam hal ini Natsir mengemukakan:

“Pengertian demokrasi dalam Islam, memberikan hak kepada rakyat supaya mengeritik, menegor, membetulkan pemerintahan yang zalim kalau tidak cukup dengan kritik dan tegoran, Islam memberikan hak kepada rakyatnya untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan jikalau perlu.”<sup>62</sup>

Demokrasi tidak sekedar sekuler (duniawi) yang merupakan urusan sosial kemanusiaan, sisi lain dalam praktiknya merupakan tanggungjawab kepada Sang Pencipta sehingga kekuatan rakyat sebagai yang berdaulat tercermin, lewat penyelenggara negara, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, pemerintah tidak melakukan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 164-165

<sup>62</sup>M. Natsir, *Op.cit.*, h. 439



kekuasaannya dengan totaliter, otoriter karena rakyat mempunyai kemandirian untuk menegor, mengoreksi penguasa.

M. Natsir tokoh nasional yang hidup dan berkiprah pada zamannya. Natsir sendiri merupakan seorang intelektual yang memiliki dasar pendidikan Barat meski ia tidak pernah meneguk ilmu langsung ke Barat, tetapi latar belakang pendidikan ini telah membentuk corak pemikirannya yang rasional tipe intelektual dengan corak modernis. Pemikirannya seperti ini telah berkembang di Indonesia sejak dibukanya pendidikan Barat buat anak bangsa sejak abad ke 20 an. Natsir yang tidak pernah belajar di pesantren tetapi ia banyak dipengaruhi *ulama* dan pemikiran Islam tradisional yang berbasis Timur Tengah, dimana Islam dipandang tidak hanya urusan pribadi tetapi juga dipraktekkan dalam masyarakat.

Di antara tokoh yang mempengaruhi M.Natsir seperti Ahmad Hasan (1887-1958) dalam perjumpaanya dalam Persis<sup>63</sup>. H.Agussalim dan Syekh Ahmad Syoekati, M. Natsir juga berkiprah dalam Masumi<sup>64</sup>. Majelis Syura Muslimin Indonesia yang terkenal dengan keagamaan. Menjadi tempat berhimpunnya potensi umat islam baik politisi, Ulama, dan cendikiawan dalam berbagai organisasi Islam.

---

<sup>63</sup> PERSIS didirikan oleh H. Zam-Zam tanggal 12 September 1923 di Bandung, organisasi ini sebagaimana NU, Syarekat Islam, Muhammadiyah memandang pentingnya nilai-nilai Islam, sehingga negara bertanggung jawab atas kepastian penerapannya dalam masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai tradisional dan modern dapat terintegansi. Lihat: Thohir Luth, M.Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 31

<sup>64</sup>Masyumi didirikan tahun 1945 oleh umat Islam sebagai tempat berkumpul untuk mencari persamaan antara organisasi Islam dalam pandangan keagamaan. Lihat; Deliar Noer, *Pandangan Islam*, hlm.16

Seperti Persis Muhammadiyah, Nadhatul Ulama. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Serdang M.Natsir memimpin Masyumi sebagai ketua umum 1949 sampai 1958<sup>65</sup>. Kiprah Natsir dalam Masyumi selama sembilan tahun cukup besar, baik terhadap agama maupun bangsa dan negara, hal ini menjadikan Natsir sebagai exponene pertahanan Islam. Dilihat dari segi kondisi bangsa dan sejarah Indonesia keberadaan Natsir sebagai tokoh Islam dihadapkan kepada situasi tantangan yang keras. Natsir sendiri dan kawan-kawan harus memiliki komitmen yang jelas, mengenai agama dan kebangsaan, Islam menjadi asas dan tauhid menjadi intinya. Islam menjadi tema sentral dalam panggung perjuangan sebagai cita-cita dalam membentuk Indonesia merdeka dan berdaulat. Natsir mengatakan cita-cita bersama jadi pangkat kaum yang bertebaran, berlainan adat dan tabiat, perbedaan kulit dan bahasa, diikat menjadi persaudaraan kandung dengna penderitan bersama memperteguh ikatan itu. Sama beriman dan ikhlas menahan derita mencapai kemerdekaan yang telah hilang, menghidupkan dan mengembangkan pusaka lama karunia Ilahi yang dinamakan "Islam"<sup>66</sup>. Dari islam (isme) kontruksi kebangsaan yang diharapkan terjebarkan dalam struktur yang islami. Natsir melihat Indonesia berpendudukan muslim terbesar, dan Islam ikatan yang lebih kuat dari ikatan-ikatan kebangsaan lainnya. Selanjutnya Natsir mengataka.

---

<sup>65</sup> Thoir Luth, *Ibid.* hlm.43

<sup>66</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: .Media Dakwah, 2001), hlm.2

Kalau ini dinamakan "agama" maka agama yang demikian dianya itu, tapi kalau "keadaan rohani" (*principe spritual*) ini didirikan oleh tarikh dan kenang-kenangan kepada kemuliaan yang telah lalu (*Lapodession en commun un eirichche legs de souvenir*), kerukunan bersama yang terus hidup (*ledesir de vivre ensemble*). Didorong oleh cita-cita hendak menghargai dan menjunjung tinggi harta pusaka yang sama diwarisi, kalau itu yang dinamakan "kebangsaan". Dalam hal ini tidak ada halangan bila dinamakan segenap ahli warisnya itu kebangsaan muslim. Nyata kesucian asal temoat terbitnya terbukti kekokohan dasar tempat berjalannya, tertentu kemuliaan arah yang ditunjukkan, segenap mereka denga demikian tidak berhalangan menamakan diri dari berbangsa muslim<sup>67</sup>.

Sebagaimana tergambar dalam uraian-uraian sebelumnya, bahwa M.Natsir adalah seorang yang banyak dipengaruhi oleh kelompok masyarakat atau ulama puritan-tradisional yang berbasisi Timur Tengah yakni kelompok pesantren, meski beliau memiliki dasar pendidikan Barat. M.Natsir memiliki kesetiaan ideology kepada Islam. Islam merupakan kerangka ideology potiknya hal ini terlihat disebabkan factor searah, organisasi dan memiliki keterkaitan ideologi. Jika karakteristik ideology M.Natsir dekat kepada M.Abduh dan Rasyid Ridha, al-Maududi, Hasan al Bana, Muhammad Qutb. Demikian M.Amin Rais banyak dipengaruhi tokoh-tokoh di atas, khususnya Ikhwanul al-Muslimin ketika menyelesaikan tesis

---

<sup>67</sup>Loc.Cit

doktrinya. Karakteristik pemikiran politik M. Natsir sendiri cenderung kepada *Modernisme dan fundamentalisme*

Namun demikian ideologi politik Natsir dalam mentransformasikan Islam ke dalam politik ia lebih tepat dikatakan sosok *modernis politik* ketimbang *fundamentalis*,<sup>68</sup> sebab M. Natsir tidaklah sampai menafsirkan Islam secara rigid, literalis. Penulis melihat M. Natsir tidak sampai memutlakkan semua persoalan politik dapat diatur dengan Alquran dan Hadis, dalam hal ini hanya menyangkut prinsip-prinsip umum.

Murad al-Brebesy melihat.<sup>69</sup> Ideologi politik M. Natsir memiliki fondasi Tauhid, sebagaimana ideologi politik ilmuan-ilmuan Timur Tengah. Mereka juga sama-sama menentang sekularisme yang dianggap sebagai racun dan merusak. Islam melihat kehidupan sebagai suatu yang utuh, bulat, kehidupan ukhrawi kita merupakan kelanjutan dari seluruh *performance*. Sekularisme melihat kehidupan dunia secara terpisah, seperti politik, ekonomi, budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dikaitkan dengan agama.<sup>70</sup>

Selain sekularisme bertentangan dengan ideologi Islam, juga dicurigai sebagai upaya menjauhkan umat dari agamanya, bagi M.

<sup>68</sup> *Fundamentalism is Belief that Everything in Holy Book, eg. The Bible or Koran is True*. Lihat. Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 169

<sup>69</sup> Ma'mun Murad al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan M. Amin Rais tentang Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 211

<sup>70</sup> Iwan Karmawan Arie, *Politik Kontemporer: Cikal Bakal Kepemimpinan Amin Rais Legenda Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 75-76.

Natsir sekularisme harus ditolak, sama saja yang ekstrim maupun moderat, begitupun gerakan sekularisasi yang pada akhirnya menjadi sekularisasionisme.

Dalam memandang posisi dakwah. Dakwah merupakan strategi dalam merekonstruksi sosial dalam semua dimensi sosial. Bagi Natsir, semua aktivitas-aktivitas manusia berdimensi dakwah, khususnya politik, sebagaimana ungapnya, "Dulu kita berdakwah lewat politik dan sekarang berpolitik lewat dakwah". Bagi Natsir dakwah merupakan sentral dan pondasi pengabdian kepada Allah.

## BAB. IV

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*

Pemikiran politik M. Natsir berporos kepada akar pemikiran islam yang berkembang di Timur Tengah yang memandang islam sebagai agama yang lengkap, terutama pengaruh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, abu al-A'la al-Maududi, Sayyid qutb, pemikiran mereka ini memang menjadi idola beberapa kalangan di Indonesia, dimana umat Islam dapat menggerakkan potensi sosial politiknya untuk membentuk suatu kekuatan dalam suatu negara. Natsir melihat bahwa kondisi paktual bangsa Indonesia adalah mayoritas muslim, paktor sejarah dan perjuangan yang disumbangkan umat Islam untuk kemerdekaan, maka Islam sebagai yang telah tertanam dan berurat berakar dalam kalbu Bansa Indonesia. Dimana Islam yang berasaskan Tauhid, mengesakan Allah swt. Dari sini akan lahir keluhuran, kesadaran identitas sebagai hamba yang mengabdikan kepada Allah dalam setiap amal-perbuatannya, dalam konteks politik dan kenegaraan adalah salah satu lapangannya.

## B. *Saran-Saran*

Dinamika tipologi pemikiran politik di Indonesia akan selalu mewarnai udara politik kita, sebab secara historis kolonial telah membelah pemikiran bangsa ini, dengan sifat yang mencolok, bahkan didukung oleh pendidikan, hingga saat ini, disamping corak pemikiran dan idiologi ini sangat rentan kepada perpecahan, meski sesama Islam. Ada dua kemungkinan negative yang bakal muncul. Pertama, Pertentangan politik akan mencuat manakala sifat dan tindakan pemimpin kita tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, ketulusan dan kemanusiaan. Kericuhan dapat saja teredam selama pemerintah kuatn hal inipun akan bersifat negatif terhadap pendidikan politik, maka tindakan yang lebih tepat adalah konsisten kepada jiwa nasionalisme dan ruh islamisme . Kedua, potensi kontroversial itu akan mudah dibakar oleh pihak-pihak ketiga baik dari kekuatan dalam negeri maupun luar, karena itu kewaspadaan nasional perlu terus diingatkan, agar kesatuan nasional tetap terpelihara.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Aqib Sumitro, *Politik Islam Hindia Belanda*, Pen. LP3ES, Jakarta, Cet. III. 1996, h. 200-201
2. Sulastomo, Dkk. *Kontekstual Ajaran Islam* (Ed) 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA. Pen. Para madina. Cet. I. 1995. H. 404.
3. Sehubungan dengan Pan-Islam telah diadakan beberapa konres seperti kongres dunia Islam di Kairo tanggal, 13-19 Mei 1926 diprakarsai oleh Raja Fuad. Kongres Khilafah tanggal, 1 juni 1926 di Mekkah atas prakarsa Raja Ibnu Saud dengan mengirim HOS. Cokroaminoto (SI), dan KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah) tahun
4. Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, cet IV, Panitia penerbit, dibawah Bendera Revolusi 1969 h. 110-111
5. John Obert, Voll. *Politik Islam; Kelangsungan dan perubahan didunia Midern*, Pent. Ajad sudrajat, cet. I, pen. Titian Ilahi Press, 1997. h. 59
6. *Dewan redaksi, Ensiklopedi Islam*, pen. PT. Ikhtian Baru Van Hove, Jakarta, cet. I.V, 1999, h. 80.
7. Untuk melihat alur pemikiran politik Soekarno, ia banyak mendasarkan pemikirannya dari negeri-negeri muslim dan mengambil tokoh-tokoh idolanya yang cenderung sekuler, ia mampu mengadakan perbandingan secara netral dari tokoh-tokoh sebaliknya, pembahasan Soekarno dalam hal ini lihat, *Dibawah Bendera Revolusi*, Memudahkan pengertia Islam Op.Cit. 369-402, Khusus pandangan Soekarno tentang Turki Lihat, h. 403 dalam Buku yang sama, *Apa sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara* Lihat Bakhtiar Effendy h. 78-79



8. Dedy Djameluddin malik, Idi Subandi Ibrahim, *Zaman baru Islam Indonesia, Pemikiran dan aksi politik*, pen. Zaman Wacana Mulia, cet. I. Januari, 1988. h. 32
9. M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia*, sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, pen. Paramadina, cet. I. 1995. h.20
10. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam ; Interpretasi untuk Aksi*. Prn. Mizan, bandung 1991. Cet. I. h. 373
11. M. Natsir, *Loc. Cit.*, pemikiran bahwa Imam (Khalifah) diangkat adalah untuk tegaknya agama dan terpeliharanya tatanan sosial (dunia), dikemukakan al-Mawardi (370-450 H). Lihat; Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, pen. Darul Falah, pent. Fadhi Bahri dalma edisi Indonesia, cet. I, 2000 M, h. 1. selanjutnya lihat Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, pen. LP3ES, Jakarta, cet. III, h. 26, begitupun Ibnu Taimiyah (1263-1328), h. 33.
12. Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), Cet. I, h. 142.
13. Yusril Ihza Mahendra, dalam Topik: Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi, Telaah tentang Dinamika Islam dan Transformasinya kedalam Ideologi Politik. Lihat, Anwar Harjono dkk. *Pemikiran, Perjuangan Muhammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet. I, h. 65.
14. *Islam is Indeed Much More Than a System of Theology is a Complete Civilization*, Prof. HAR. Gibb. Lihat; M. Hasheem, *Kekayaan Dunia Terhadap Islam*, cet. II. (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 190

15. Ahmad Muflih Saefuddin dalam, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, pen. Pustaka Firdaus, cet. I, 1996, h. 129-130. Lihat, Bahtiar Effendy, *Islam dan Politik ...*
16. Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), cet. III, h. 164.
17. Bakhtiar Efendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 107.
18. Pidato Muhammad Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957. lihat Moh. Natsir "Islam sebagai Dasar Negara", Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957, h. 8
19. *Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*, (tt), Jilid. III, h. 44
20. PERSIS didirikan oleh H. Zam-Zam tanggal 12 September 1923 di Bandung, organisasi ini sebagaimana NU, Syarekat Islam, Muhammadiyah memandang pentingnya nilai-nilai Islam, sehingga negara bertanggung jawab atas kepastian penerapannya dalam masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai tradisional dan modern dapat terintegansi. Lihat: Thohir Luth, M.Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 31
21. Masyumi didirikan tahun 1945 oleh umat Islam sebagai tempat berkumpul untuk mencari persamaan antara organisasi Islam dalam pandangan keagamaan. Lihat; Deliar Noer, *Pandangan Islam*, hlm.16
22. M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm.2
23. *Fundamentalism is Belief that Everything in Holy Book, eg. The Bible or Koran is True*. Lihat. Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 169

24. Ma'mun Murad al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan M. Amin Rais tentang Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 211
25. Iwan Karmawan Arie, *Politik Kontemporer: Cikal Bakal Kepemimpinan Amin Rais Legenda Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 75-76.

